



# LAPORAN KINERJA



# 2023

**BALAI BESAR KSDA NTT**



# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur (BBKSDA NTT) telah diselesaikan dengan baik.

LKj BBKSDA NTT Tahun 2023 ini terdiri dari pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja berupa capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran, yang diuraikan

secara detail dan transparan sehingga dapat memberikan informasi kepada pemberi amanat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) dan para pihak yang membutuhkan, sekaligus dapat dinilai dan dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi BBKSDA NTT.

Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada setiap sasaran strategis kegiatan sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Penyusunan LKj merupakan kewajiban yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.8/KSDAE-SET/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan Reviu Atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

LKj BBKSDA NTT tahun 2023 ini merupakan lanjutan dari laporan tahun 2022 yang menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) BBKSDA NTT Tahun 2020-2024. Oleh karenanya pencapaian kinerja pada tahun ini diharapkan berkesinambungan sampai dengan tahun 2024. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi bahan evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja pada tahun selanjutnya.

Kupang, Januari 2024  
Kepala Balai Besar,



*Arief Mahmud*  
Ir. Arief Mahmud, M.Si  
NIP. 19671130 199403 1 004

# TWA MENIPO



## PANORAMA TWA MENIPO

Keindahan alam Taman Wisata Alam Menipo sudah tidak diragukan lagi. Memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan bentang alam yang indah patut dijadikan objek wisata utama masyarakat Nusa Tenggara Timur





# Ringkasan Eksekutif

**102,16 %**

**Nilai kinerja Balai Besar  
KSDA NTT Tahun 2023**

**98,35 %**

**Realisasi Anggaran Nilai  
kinerja Balai Besar KSDA  
NTT Tahun 2023**

**0,92**

**Efektivitas pencapaian  
kinerja Balai Besar KSDA  
NTT.**

**Sebagai catatan, Rasio < 1,  
menunjukkan efektivitas  
pencapaian kinerja menurun,  
artinya efektivitas kinerja  
Tahun 2023 lebih rendah  
dibandingkan efektivitas  
kinerja tahun sebelumnya.**

**1,04**

**Efisiensi penggunaan  
anggaran Balai Besar KSDA  
NTT.**

**Sebagai catatan, Rasio > 1  
atau = 1 menunjukkan  
penggunaan sumber daya  
dalam pelaksanaan kegiatan  
berjalan secara efisien.**



# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja (LKj) merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun untuk mencapai tujuan yang terdiri atas aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/tujuan organisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan diukur menggunakan indikator hasil (outcome) yang mencerminkan suatu ukuran terjaminnya fungsi keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program dan indikator keluaran (output) yang merupakan ukuran barang/jasa sebagai hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan, program serta kebijakan.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur (BBKSDA NTT) merupakan salah satu UPT Ditjen KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkedudukan di Kupang Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 BBKSDA NTT memiliki tugas menyelenggarakan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, pengelolaan kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata Alam, dan Taman Buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kawasan hutan konservasi pada wilayah kerja Balai Besar KSDA NTT terdiri dari 28 unit dengan total luas 233.659,74 Ha. Terdiri dari 8 (delapan) kawasan Cagar Alam, 6 (enam) kawasan Suaka Margasatwa, 12 (dua belas) kawasan TWA daratan dan perairan serta 2 (dua) kawasan Taman Buru.

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah gambaran terkait tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan strategi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan, suatu instansi akan dituntut untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra).

Balai Besar KSDA NTT harus melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Sejalan dengan peraturan-peraturan diatas, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BBKSDA NTT merupakan laporan pertanggungjawaban publik atas Keputusan Kepala Balai Besar KSDA NTT Nomor : SK.01/K.5/TU/REN/1/2020 Tentang Rencana Strategis Balai Besar KSDA NTT Tahun 2020-2024 pada tahun pertama, Keputusan Kepala Balai Besar KSDA NTT Nomor : SK.373 /K.5/TU/REN/12/2022 Tentang Rencana Kerja Balai Besar KSDA NTT Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja BBKSDA NTT Tahun 2023. Laporan Kinerja BBKSDA NTT merupakan laporan evaluasi atas kinerja BBKSDA NTT tahun 2023 yang tepat, jelas, terukur dan legitimate terhadap ukuran yang telah ditetapkan dan diperjanjikan dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) beserta penggunaan anggarannya, yang akan digunakan sebagai salah satu bahan dasar penyusunan rencana kerja BBKSDA NTT tahun 2024.

Maksud penyusunan LKj BBKSDA NTT tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Besar KSDA NTT kepada Direktur Jenderal (Dirjen) KSDAE atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah diperjanjikan.



Sedangkan tujuan penyusunan LKj adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BBKSDA NTT selama tahun 2023. Hasil evaluasi yang telah dilakukan bermuara terhadap adanya simpulan yang dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan, perencanaan dan strategi pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sampai dengan 31 Desember 2023 BBKSDA NTT didukung oleh sumber daya manusia (SDM) berjumlah 225 (dua ratus dua puluh lima) orang. Sebaran pegawai di BBKSDA NTT adalah sebagai berikut 139 orang berstatus PNS, PPPK 25 orang, dan PPNPN 61 orang. Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan, Balai Besar KSDA NTT membentuk 23 Resort Konservasi Wilayah serta 1 unit penanganan satwa. Selain dukungan SDM, terdapat anggaran sebagai biaya pelaksanaan kegiatan tahun 2023 berasal dari DIPA BA 029 yakni sebesar Rp 28.904.772.000,- (Dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Anggaran ini terbagi menjadi tiga jenis belanja yaitu: a) belanja pegawai Rp. 14,657,431,000,- b). belanja barang Rp. 13,047,341,000,- c) belanja modal Rp. 1,200,000,000,-. Anggaran ini digunakan untuk mendukung program Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja BBKSDA NTT tahun 2023 bernilai 102,16 (SANGAT BAIK) atau berhasil. Realisasi anggaran yang digunakan untuk pencapaian target kinerja sebesar 98,35%.

Efektifitas pencapaian kinerja BBKSDA NTT pada Tahun 2023 menurun dari Tahun 2022 dengan nilai rasio 0,91. Rasio efisiensi pencapaian kinerja BBKSDA NTT pada Tahun 2023 sebesar 1,29. Keberhasilan dalam capaian kinerja BBKSDA NTT ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen lingkup BBKSDA NTT, stake holder dan masyarakat. Hal-hal yang akan dilakukan BBKSDA NTT dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang adalah meningkatkan ketepatan perencanaan, pengawasan pelaksanaan kegiatan, sinergitas kinerja dan anggaran.





# Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
Ringkasan Eksekutif .....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	vii
Daftar Lampiran.....	vii
<b>BAB.1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Profil Organisasi.....	3
<b>BAB. 2 PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Rencana Strategis .....	8
2.2. Rencana Kerja .....	9
2.3. Perjanjian Kinerja .....	11
2.4. Perjalanan Anggaran .....	13
2.5. Pohon Kinerja .....	14
<b>BAB. 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>20</b>
3.1. Capaian Kinerja .....	20
3.1.1. Analisis Capaian Kinerja .....	21
3.1.2. Analisis Efektivitas Kinerja Tahun 2023 .....	28
3.1.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	28
3.2 Realisasi Anggaran .....	85
3.3Penghargaan Atas Prestasi Kerja .....	86
<b>BAB. 4 PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>



# Daftar Tabel

Tabel 1. Daftar Kawasan Hutan Konservasi pada BBKSDA NTT.....	5
Tabel 2. Tabel Rencana Kerja BBKSDA NTT Tahun 2023 .....	9
Tabel 3. Perjanjian Kinerja BBKSDA NTT Tahun 2023 .....	11
Tabel 4. Perjalanan anggaran Balai Besar KSDA NTT Tahun 2023.....	14
Tabel 5. Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Balai Besar KSDA NTT.....	22
Tabel 6. Efektifitas pencapaian kinerja BBKSDA NTT pada Tahun 2023.....	28
Tabel 7. Efisiensi penggunaan anggaran BBKSDA NTT pada Tahun 2023.....	29
Tabel 8. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 1.....	30
Tabel 9. Perbandingan nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2022-2023.....	31
Tabel 10. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 1.....	31
Tabel 11. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 2. ....	34
Tabel 12. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 2.....	34
Tabel 13. Analisis efisiensi pencapaian IKK 2 Tahun 2023.....	36
Tabel 14. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 3. ....	37
Tabel 15. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 3.....	37
Tabel 16. Analisis efisiensi pencapaian IKK 3 Tahun 2023.....	40
Tabel 17. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 4. ....	41
Tabel 18. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 4.....	41
Tabel 19. Analisis efisiensi pencapaian IKK 4 Tahun 2023.....	43
Tabel 20. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 5 .....	44
Tabel 21. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 6.....	44
Tabel 22. Kelompok Binaan BBKSDA NTT penerima bantuan ekonomi produktif tahun 2023.....	45
Tabel 23. Analisis efisiensi pencapaian IKK Tahun 2023 .....	46
Tabel 24. Perbandingan target dan realisasi sasaran IKK 6.....	47
Tabel 25. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 6.....	47
Tabel 26. Analisis efisiensi pencapaian IKK 6 Tahun 2023.....	50
Tabel 27. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 7 .....	51
Tabel 28. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 7.....	51
Tabel 29. Analisis efisiensi pencapaian IKK 7 Tahun 2023.....	53
Tabel 30. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 8 .....	54
Tabel 31. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 8.....	54
Tabel 32. Analisis efisiensi pencapaian IKK 8 Tahun 2023.....	56
Tabel 33. Perbandingan target dan realisasi sasaran IKK 9.....	57
Tabel 34. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 9.....	57
Tabel 35. Analisis efisiensi pencapaian IKK Tahun 2023 .....	58
Tabel 36. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 10 .....	59
Tabel 37. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 10 .....	59
Tabel 38. Analisis efisiensi pencapaian IKK 10 Tahun 2023 .....	62
Tabel 39. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 11.....	63
Tabel 40. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 11 .....	63
Tabel 41. Analisis efisiensi pencapaian IKK 11 Tahun 2023 .....	66
Tabel 42. Perbandingan target dan realisasi sasaran IKK 12 .....	67
Tabel 43. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 12 .....	67
Tabel 44. Analisis efisiensi pencapaian IKK 12 Tahun 2023 .....	68



Tabel 45. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 13 .....	69
Tabel 46. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 13 .....	69
Tabel 47. Analisis efisiensi pencapaian IKK 13 Tahun 2023 .....	71
Tabel 48. Perbandingan target dan realisasi sasaran IKK 14 .....	72
Tabel 49. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 14 .....	72
Tabel 50. Analisis efisiensi pencapaian IKK 14 Tahun 2023 .....	74
Tabel 51. Perbandingan target dan realisasi sasaran IKK 15 .....	75
Tabel 52. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 15 .....	75
Tabel 53. Analisis efisiensi pencapaian IKK Tahun 2023 .....	76
Tabel 54. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 16 .....	77
Tabel 55. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 16 .....	77
Tabel 56. Analisis efisiensi pencapaian IKK 16 Tahun 2023 .....	78
Tabel 57. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 17 .....	79
Tabel 58. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 17 .....	79
Tabel 59. Analisis efisiensi pencapaian IKK 17 Tahun 2023 .....	82
Tabel 60. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 18 .....	83
Tabel 61. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 18 .....	83
Tabel 62. Analisis efisiensi pencapaian IKK 18 Tahun 2023 .....	84
Tabel 63. DIPA BBKSDA NTT Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja. ....	85



# Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi BBKSDA NTT .....	4
Gambar 2. Sebaran Kawasan Konservasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	5
Gambar 3. Petugas sedang berusaha memadamkan kebakaran hutan di Cagar Alam Mutis.....	6
Gambar 4. Kronologis DIPA BBKSDA NTT Tahun 2023 .....	13
Gambar 5. Capaian Anggaran dan Capaian Kinerja BBKSDA NTT Tahun 2020 s/d 2023 .....	21
Gambar 6. Grafik Populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning di SM Harlu 2011-2023.....	64
Gambar 7. Grafik Jumlah Konflik Manusia dengan Buaya Tahun 2019-2023 di NTT.....	73
Gambar 8. Piagam penghargaan dari Pos Kupang Award – Penghargaan Kepedulian dan Penyelamatan Satwa Liar Endemik Nusa Tenggara Timur pada Pos Kupang Award 2023 .....	86
Gambar 9. Ucapan Terima Kasih dari Dinas Pariwisata Kota Kupang kepada Balai Besar KSDA NTT sebagai Dukungan Pelaksanaan Koepan Festival 2023 .....	86



# Daftar Lampiran

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BBKSDA NTT Tahun 2023 ..... 89



“Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea parvula*) di Suaka Margasatwa Harlu”



# BAB.1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya pemerintahan yang bersih (*Good Governance*) dan demi mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, maka setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang telah dilakukan, sehingga setiap penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna. Setiap anggaran yang telah diberikan kepada setiap lembaga atau organisasi harus dapat ditertanggungjawabkan secara akuntabel. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah gambaran terkait tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan strategi, yang mengindikasikan sesuai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan dengan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan, suatu instansi akan dituntut untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra). LKj merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun untuk mencapai tujuan yang terdiri atas aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran/tujuan organisasi.

Keberhasilan pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan diukur menggunakan indikator hasil (*outcome*) yang mencerminkan suatu ukuran terjaminnya

Fungsi keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program dan indikator keluaran (*output*) yang merupakan ukuran barang/jasa sebagai hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan

dalam mendukung pencapaian sasaran dan tujuan, program serta kebijakan.

Sasaran/target kinerja instansi yang telah tertuang di dalam Renstra merupakan sarana pimpinan instansi beserta seluruh staf/pegawai dalam merancang dan menentukan masa depan instansi tersebut. Renstra digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan dan implementasi program dan kegiatan, karena dalam jangka menengah instansi tersebut dapat diminta pertanggungjawaban mengenai hasil-hasil (*outcome*) ataupun keluaran-keluaran (*output*) yang harus terwujud. Penjabaran Renstra secara tahunan tertera dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang berisikan informasi target tahunan secara rinci.

Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan yang akan menerjemahkan Renstra atau Dokumen Perencanaan Kerja Jangka Menengah dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam suatu tahun tertentu. Renja disusun setelah keluarnya pagu definitif atau sebelum ada alokasi anggaran/pagu definitif. Target tahunan yang dirinci dalam Renja akan menjadi dasar penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan pernyataan komitmen/janji dalam mencapai target kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu organisasi atau instansi kepada atasannya langsung.

BBKSDA NTT menyusun LKj Tahun 2022 dengan mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, sebagai bentuk



pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal KSDAE atas pelaksanaan sasaran/target kegiatan dan pengelolaan anggaran yang telah diperjanjikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di CA, SM, TWA dan TB serta koordinasi teknis pengelolaan Tahura dan KEE berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan LKj adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BBKSDA NTT selama tahun 2023. Hasil evaluasi yang telah dilakukan bermuara terhadap adanya simpulan yang dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan, perencanaan dan strategi pada tahun-tahun berikutnya.

Setelah adanya pertemuan puncak pemimpin negara-negara anggota G20 yang dihelat di Bali pada 15-16 November 2022. Dimana terdapat 52 poin kesepakatan dalam dokumen deklarasi bertajuk G20 Bali Leader's Declaration. Sebagian di antaranya adalah komitmen menangani ketahanan pangan, perubahan iklim, krisis energi serta mendorong pembiayaan untuk lingkungan.

Deklarasi G20 juga berkomitmen mendorong semua negara dan pihak-pihak untuk memfinalisasi dan mengadopsi *Global Biodiversity Framework* (GBF) untuk menghentikan dan membalikkan kehilangan keanekaragaman hayati pada 2030. Caranya antara lain dengan memerangi penggundulan hutan, desertifikasi, degradasi lahan dan kekeringan serta mencapai degradasi lahan netral pada 2030.

BBKSDA NTT sebagai UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus siap melaksanakan kesepakatan G20 yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsinya.



## 1.2. PROFIL ORGANISASI

Lembaga/instansi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap kegiatan konservasi sumber daya alam di Provinsi NTT pertama kali berdiri tahun 1975 dengan nama Unit Konservasi Alam sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 190/Kpts/75. Lembaga tersebut beberapa kali mengalami perubahan mengikuti struktur organisasi kementerian dan menyesuaikan ketuhan organisasi yang ada.

Berdasarkan perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem tanggal 26 Juli 2022, BBKSDA NTT bertanggung jawab kepada Ditjen KSDAE berdasarkan.

BBKSDA NTT adalah UPT KSDA tipe B yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dirjen KSDAE, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik, dan koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagan organisasi BBKSDA NTT dapat dilihat pada gambar 2.

Dalam melaksanakan tugas BBKSDA NTT menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya sebagai berikut:

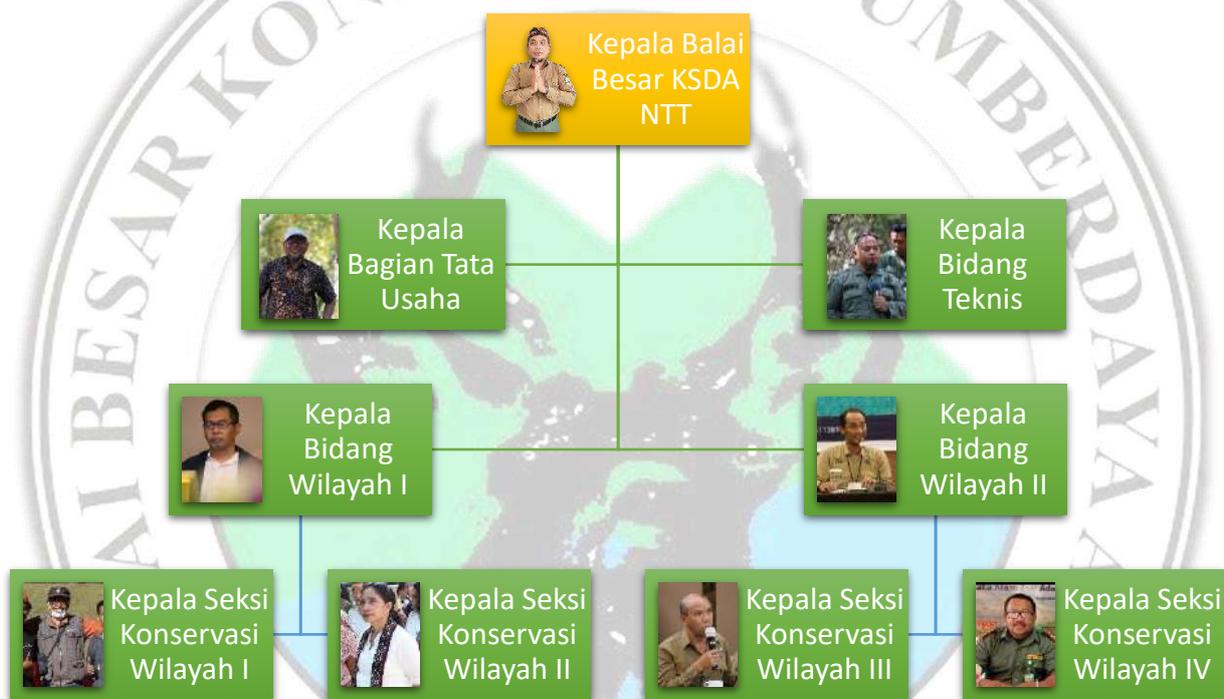
- a) Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- b) Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, pemeliharaan batas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;

- c) Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d) Pengendalian kebakaran hutan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- e) Pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- f) Pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- g) Pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru;
- h) Evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- i) Pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- j) Penyiapan pembentukan dan operasionalisasi kesatuan pengelolaan hutan konservasi;
- k) Penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- l) Penyelenggaraan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- m) Pengawasan dan pengendalian peredaran spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar;
- n) Koordinasi teknis penetapan dan pengelolaan koridor hidupan liar dan kawasan ekosistem esensial atau kawasan dengan nilai konservasi tinggi;
- o) Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya;



- p) Pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
- q) Penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- r) Pemberdayaan masyarakat di cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;
- s) Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru;

Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, pelayanan perizinan, dan pengelolaan data dan informasi.



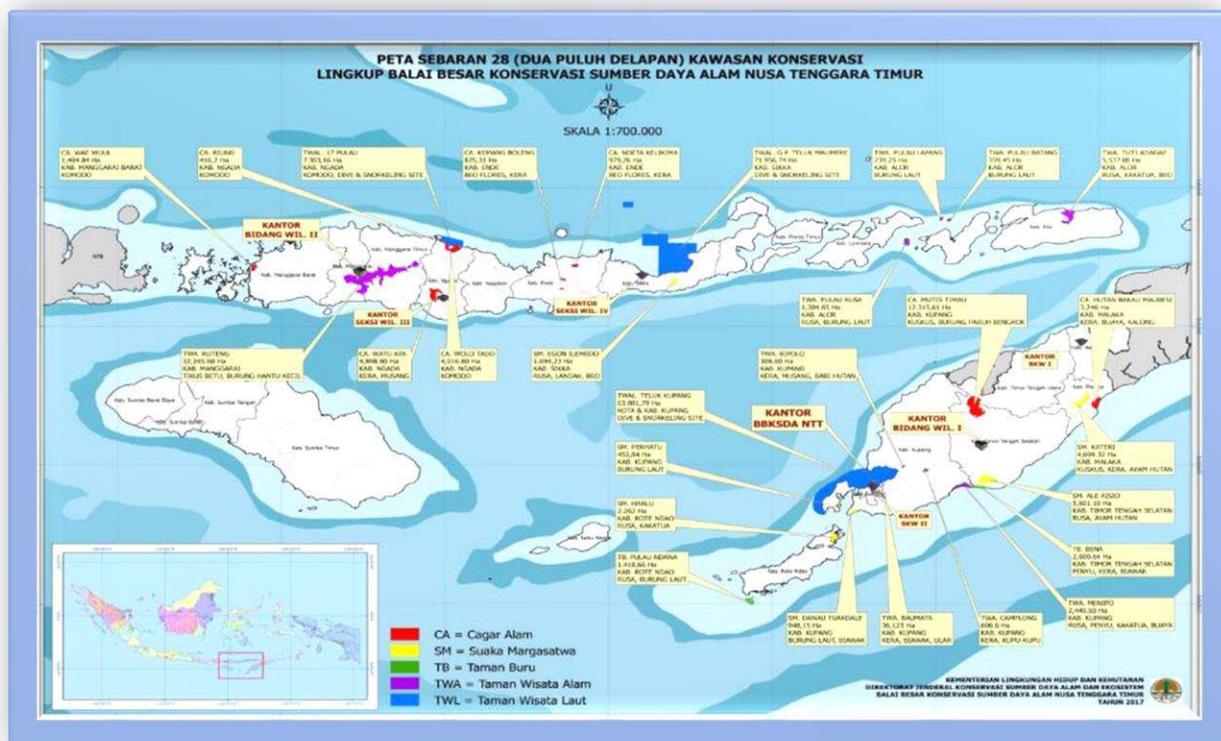
Gambar 1. Struktur Organisasi BBKSDA NTT

Sebagai tindak lanjut dari Permenhut tersebut, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBKSDA NTT, maka ditetapkan 23 (dua puluh tiga) Resort KSDA Wilayah yang tersebar di wilayah kerja BBKSDA NTT dan merupakan jabatan non struktural melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Nomor SK.13/K.5/TU/KUM.1/1/2022 tentang Pengembangan Resort Melalui Optimalisasi Operasional Resort Berbasis Smart RBM Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, tanggal 3 Januari 2022.

Kawasan konservasi yang dikelola oleh BBKSDA NTT terdiri dari 28 kawasan konservasi dengan luas total 233.659,69 hektar. Kawasan tersebar di beberapa pulau di wilayah Provinsi NTT diantaranya Pulau Timor, Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Semau, Pulau Rote dan pulau-pulau kecil lainnya.

Tabel 1. Daftar Kawasan Hutan Konservasi pada BBKSDA NTT

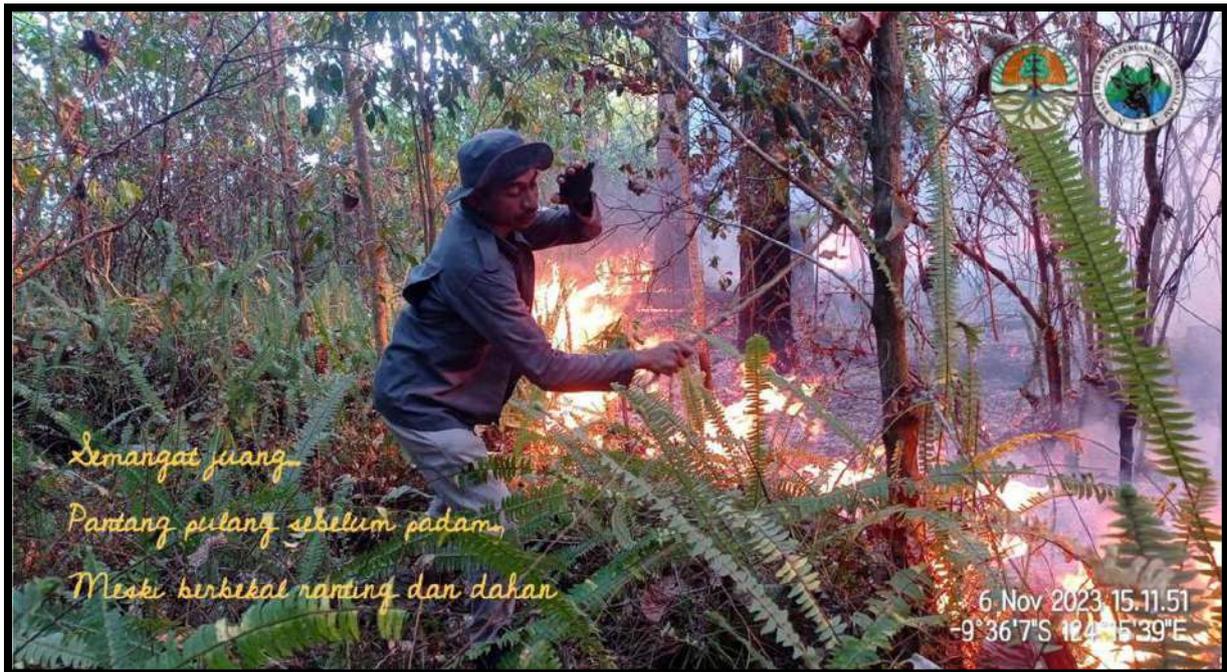
NAMA/FUNGSI KAWASAN	LUAS (Ha)	NAMA/FUNGSI KAWASAN	LUAS (Ha)
<b>Cagar Alam</b>	<b>28.183,32</b>	<b>Taman Buru</b>	<b>3.419,30</b>
1. CA. Wolo Tado	4.016,80	1. TB.Pulau Ndana	1.418,66
2. CA. Watu Ata	4.898,80	2. TB. Bena	2.000,64
3. CA. Riung	416,20	<b>Taman Wisata Alam/Laut</b>	<b>186.399,43</b>
4. CA. Kimang Boleng	825,31	1. TWA.Pulau Lapang	239,25
5. CA. Ndeta Kilikima	979,76	2. TWA. Pulau Batang	359,45
6. CA. Wae Wuul/Mburak	1.484,84	3. TWA. Baumata	36,21
7. CA. Hutan Bakau Maubesi	3.246,00	4. TWA.Bipolo	308,60
8. CA. Mutis Timau	12.315,61	5. TWA. Tuti Adagae	5.537,88
<b>Suaka Margasatwa</b>	<b>15.657,64</b>	6. TWA. Ruteng	32.245,60
1. SM. Danau Tuadale	948,15	7. TWAL. Tujuh Belas Pulau	7.303,16
2. SM. Egon Ilimedo	1.694,23	8. TWAL. Teluk Kupang	63.881,79
3. SM. Ale Aisio	5.601,10	9. TWA. Pulau Rusa	1.384,65
4. SM. Harlu	2.262,00	10. TWAL. Teluk Maumere	71.956,74
5. SM. Perhatu	452,84	11. TWA. Camplong	696,60
6. SM. Kateri	4.699,32	12. TWA. Menipo	2.449,50



Gambar 2. Sebaran Kawasan Konservasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Adapun isu strategis yang dihadapi selama kurun waktu tahun 2023 antara lain:

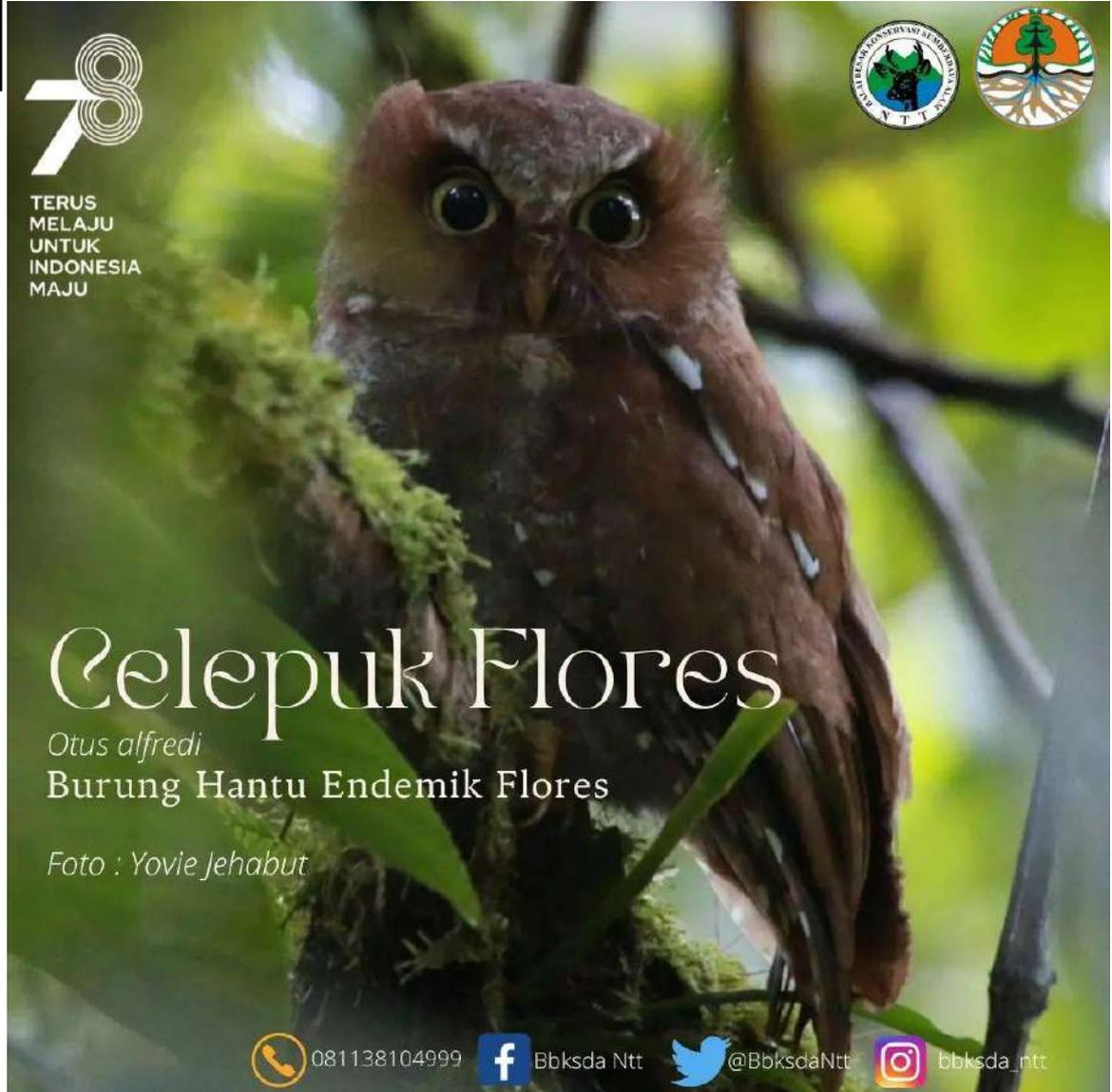
1. Evaluasi kesesuaian fungsi pada Cagar Alam Mutis Timau
2. Gangguan terhadap kawasan hutan konservasi berupa perambahan dan kebakaran
3. Konservasi satwa liar seperti kura-kura rote dan biawak komodo
4. Perencanaan kawasan konservasi
5. Inventarisasi dan verifikasi keanekaragaman hayati di dalam dan luar Kawasan konservasi
6. Inventarisasi dan verifikasi pemanfaatan di dalam kawasan konservasi
7. Optimalisasi pemanfaatan wisata alam
8. Perlindungan kawasan konservasi dan pengendalian kebakaran.



Gambar 3. Petugas sedang berusaha memadamkan kebakaran hutan di Cagar Alam Mutis



TERUS  
MELAJU  
UNTUK  
INDONESIA  
MAJU



# Celepuk Flores

*Otus alfredi*

Burung Hantu Endemik Flores

Foto : Yovie Jehabut



081138104999



Bbksda Ntt



@BbksdaNtt



bbksda\_ntt

“Celepuk Flores atau *Otus alfredi* merupakan burung hantu endemik Pulau Flores”



# BAB. 2 PERENCANAAN KINERJA

## 2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) BBKSDA NTT Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra BBKSDA NTT telah mengacu pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dan Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024. BBKSDA NTT sebagai unit pelaksana teknis mendukung kebijakan pembangunan nasional serta kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK).

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020) dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, dan berkenaan dengan Misi ke-4 yakni : "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan", maka untuk itu, pernyataan Misi tersebut dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Visi dan Misi KLHK.

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

- 1) Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
- 2) Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan misi tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2021-2024, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;



- 3) Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
- 4) Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

## 2.2. RENCANA KERJA

Rencana Kerja BBKSDA NTT tahun 2023 disusun sebagai acuan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan bagi seluruh staf lingkup BBKSDA NTT dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional serta menjadi acuan dalam penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2. Tabel Rencana Kerja BBKSDA NTT Tahun 2023

No.	Kode	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Output
1.	5419.EBA.962	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program, anggaran, evaluasi data dan informasi</li> <li>- Pengelolaan kepegawaian, jabfung dan ortala</li> <li>- Pengelolaan keuangan dan umum</li> <li>- Gaji dan tunjangan</li> <li>- Operasional dan pemeliharaan kantor</li> </ul>
2.	5419.EBB	Layanan Prasarana Internal	Level Maturitas SPIP Laporan Keuangan Direktorat Jenderal KSDAE yang tertib dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan</li> </ul>
3.	5423.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Jumlah destinasi wisata alam <i>science, academic, voluntary, education</i> yang dikembangkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan tapak pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi</li> <li>- Pengembangan <i>Ecoedutourism</i></li> <li>- Informasi dan Promosi pengelolaan wisata alam berbasis SAVE.</li> </ul>
4.	6739.AEC	Kerjasama	Jumlah Kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada Kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tata kelola kerja sama penyelenggaraan kawasan konservasi</li> </ul>



No.	Kode	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Output
5	6739.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	Jumlah kawasan konservasi yang dilakukan Pemolaan, Penataan dan Rencana Pengelolaan KK	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan KK dan penandaan zona atau blok</li> <li>- Rencana pengelolaan kawasan konservasi</li> </ul>
6	6739.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data inventarisasi, verifikasi potensi dan permasalahan KK</li> </ul>
7	6740.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	Jumlah Kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan dan pengamanan KK</li> <li>- Pengendalian kebakaran hutan konservasi</li> </ul>
8	6740.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Jumlah desa di Kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi pendampingan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat</li> <li>- Pengelolaan usaha ekonomi produktif masyarakat desa di sekitar KK</li> </ul>
9	6740.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui Bina Cinta Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan kader konservasi</li> </ul>
10	6740.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemetaan dan telaah awal serta assesment konflik tenurial</li> </ul>
11	6741.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervensi Manajemen TSL Peredaran dan penangkaran</li> <li>- Penilaian Lembaga Konservasi</li> </ul>
12	6741.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intervensi manajemen TSL di dalam kawasan konservasi</li> </ul>
13	6741.REB	Konservasi Jenis/Spesies	Jumlah penyelamatan satwa liar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan satwa transit dan konflik</li> </ul>



No.	Kode	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Sub Output
14	6742.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Luas ekosistem yang dipulihkan	- Penanaman intensif bersama masyarakat
15	6743.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	- Fasilitasi Pengelolaan KEE/Koridor Hidupan Liar/Taman Kehati/ABKT
16	6743.REA	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	- Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Target tahunan atau biasa disebut dengan Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Direktur Jenderal KSDAE kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala BBKSDA NTT untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada output yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk dampak

(*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi kinerja; sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah dengan kinerja yang terukur berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang tersedia; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan target kinerja organisasi.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BBKSDA NTT Tahun 2023

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.	1. Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	79,5 Poin
			Maturitas SPIP Ditjen KSDAE	3 Level
			Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen
2	Perencanaan Kawasan Konservasi	Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas.	2. Luas Kawasan Hutan yang diintervensi dan di verifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	69.000 hektar
			3. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	4 Unit KK

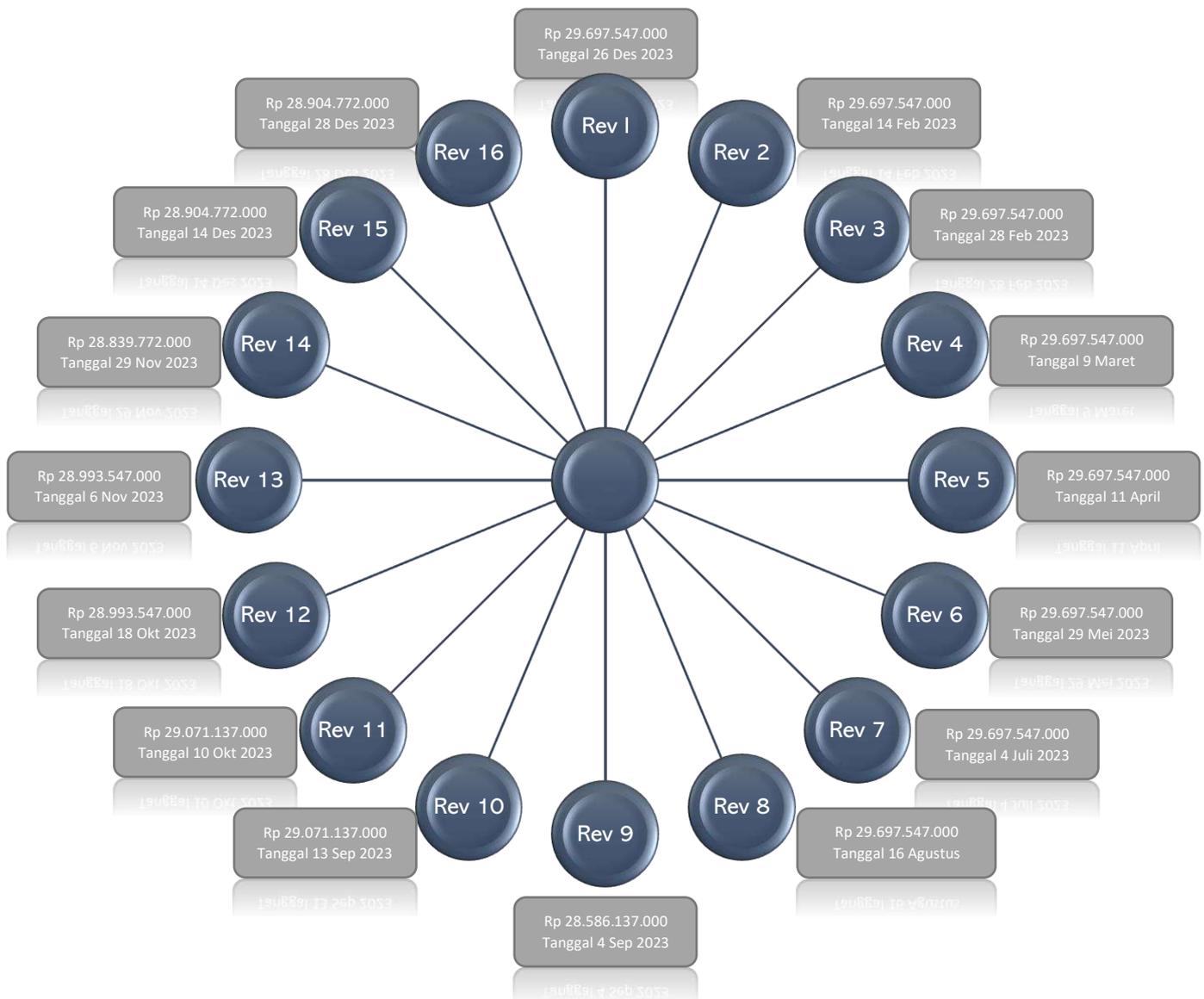


			4. Jumlah Kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	1 Dokumen
3	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	5. Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	25 Desa
			6. Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan melalui kemitraan konservasi	1.000 Hektar
			7. Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	5 Orang
		Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	8. Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	14 Unit KK
			9. Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	116 Hektar
			10. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	30 Unit
4	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman Hayati didalam dan diluar kawasan konservasi	11. Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman Hayati tinggi secara partisipatif.	139.444 Hektar
			12. Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	3 Entitas
		Terjaminnya perlindungan dan Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetic tumbuhan dan satwa liar secara lestari	13. Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	5 Entitas
			14. Jumlah penyelamatan satwa liar	15 Kejadian liar
5	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa Lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan	15. Jumlah Destinasi Wisata Alam Sciene, Academic, Voluntary, Education	1 Destinasi
6	Pemulihan Ekosistem	Meningkatnya pemulihan ekosistem	16. Luas ekosistem yang dipulihkan	266,17 hektar
7	Pembinaan pengelolaan Ekosistem Esensial	Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi	17. Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman Hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	277 Hektar
		Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan ekosistem esensial	18. Jumlah kawasan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1 Unit KEE

## 2.4. PERJALANAN ANGGARAN

Anggaran BBKSDA NTT tahun 2023 semula ditetapkan sebesar Rp. 29.697.547.000,- namun dalam perjalanan mengalami penghematan anggaran pada beberapa jenis kegiatan sebesar Rp. 792.775.000,- dan mengalami 16 (enam belas) kali revisi anggaran, hingga sampai tanggal 31 Desember 2023, pagu BBKSDA NTT sebesar Rp. 28.904.772.000,-

### Kronologis DIPA TA 2023 BBKSDA



Gambar 4. Kronologis DIPA BBKSDA NTT Tahun 2023

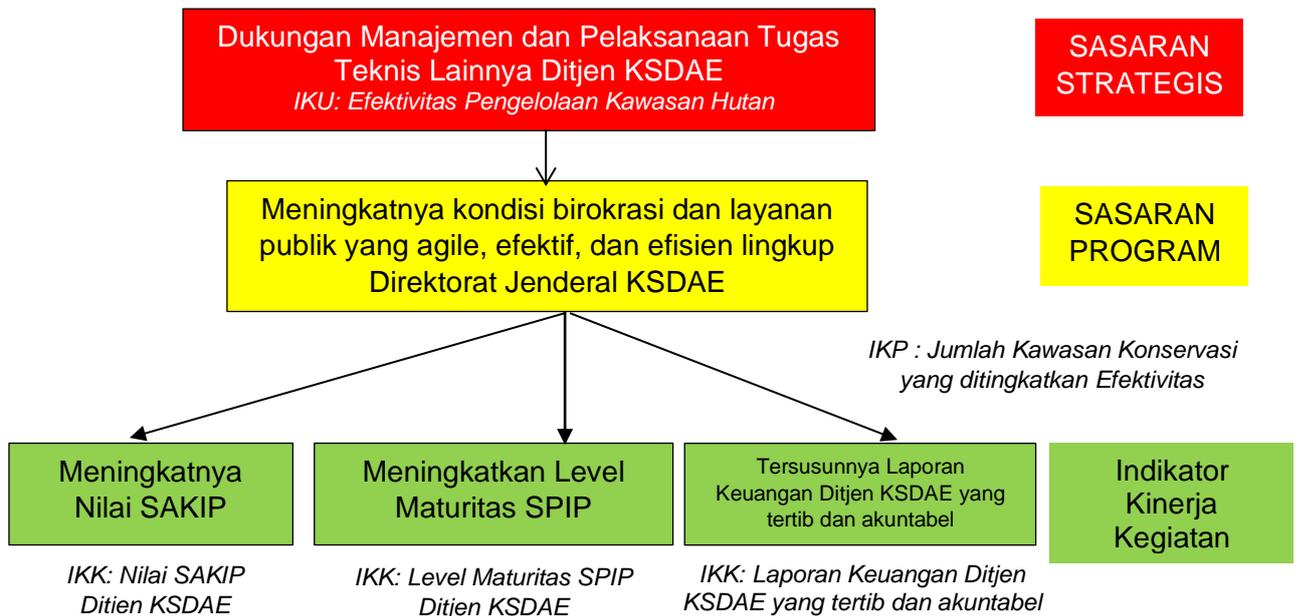


Tabel 4. Perjalanan anggaran Balai Besar KSDA NTT Tahun 2023

No.	Periode	Pagu Alokasi	Revisi (kali)	Realisasi Bulan ini	Realisasi s.d. Bulan ini	%
1	Januari	29.697.547.000		538.277.292	538.277.292	1,86
2	Februari	29.697.547.000	2	1.347.327.199	1.885.604.491	6,52
3	Maret	29.697.547.000	1	1.945.552.374	3.831.156.865	13,25
4	April	29.697.547.000	1	2.973.596.786	6.804.753.651	23,54
5	Mei	29.697.547.000	1	1.633.899.899	8.438.653.550	29,19
6	Juni	29.697.547.000		2.413.075.743	10.851.729.293	37,54
7	Juli	29.697.547.000	1	2.157.700.743	13.009.430.036	45,01
8	Agustus	29.697.547.000	1	2.231.218.798	15.240.648.834	52,73
9	September	28.586.137.000	2	1.839.852.060	17.080.500.894	59,09
10	Oktober	28.993.547.000	2	2.443.393.566	19.523.894.460	67,55
11	November	28.839.772.000	2	3.317.233.501	22.841.127.961	79,02
12	Desember	28.904.772.000	2	5.585.802.685	28.426.930.646	98,35

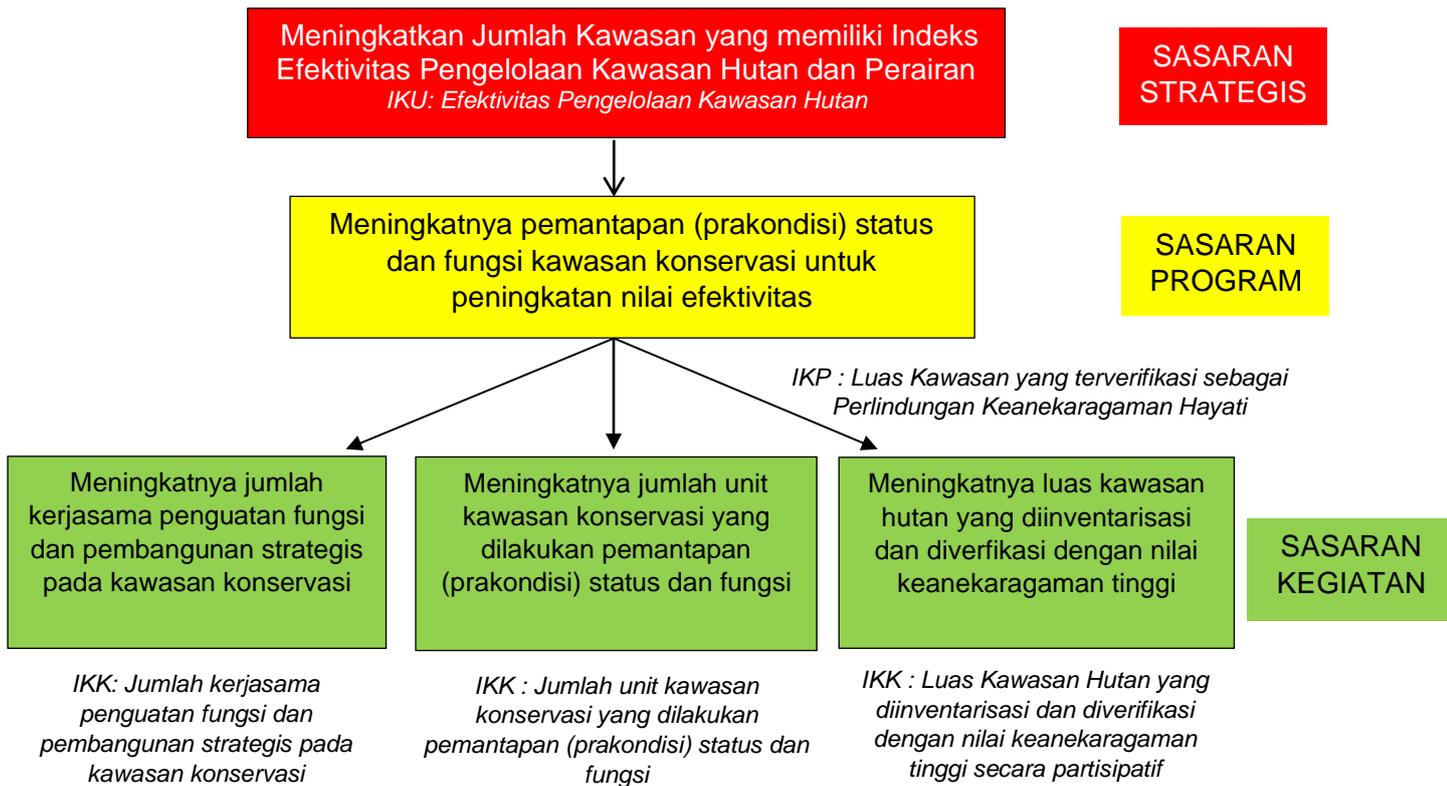
## 2.5. POHON KINERJA

### 1. Dukungan Manajemen

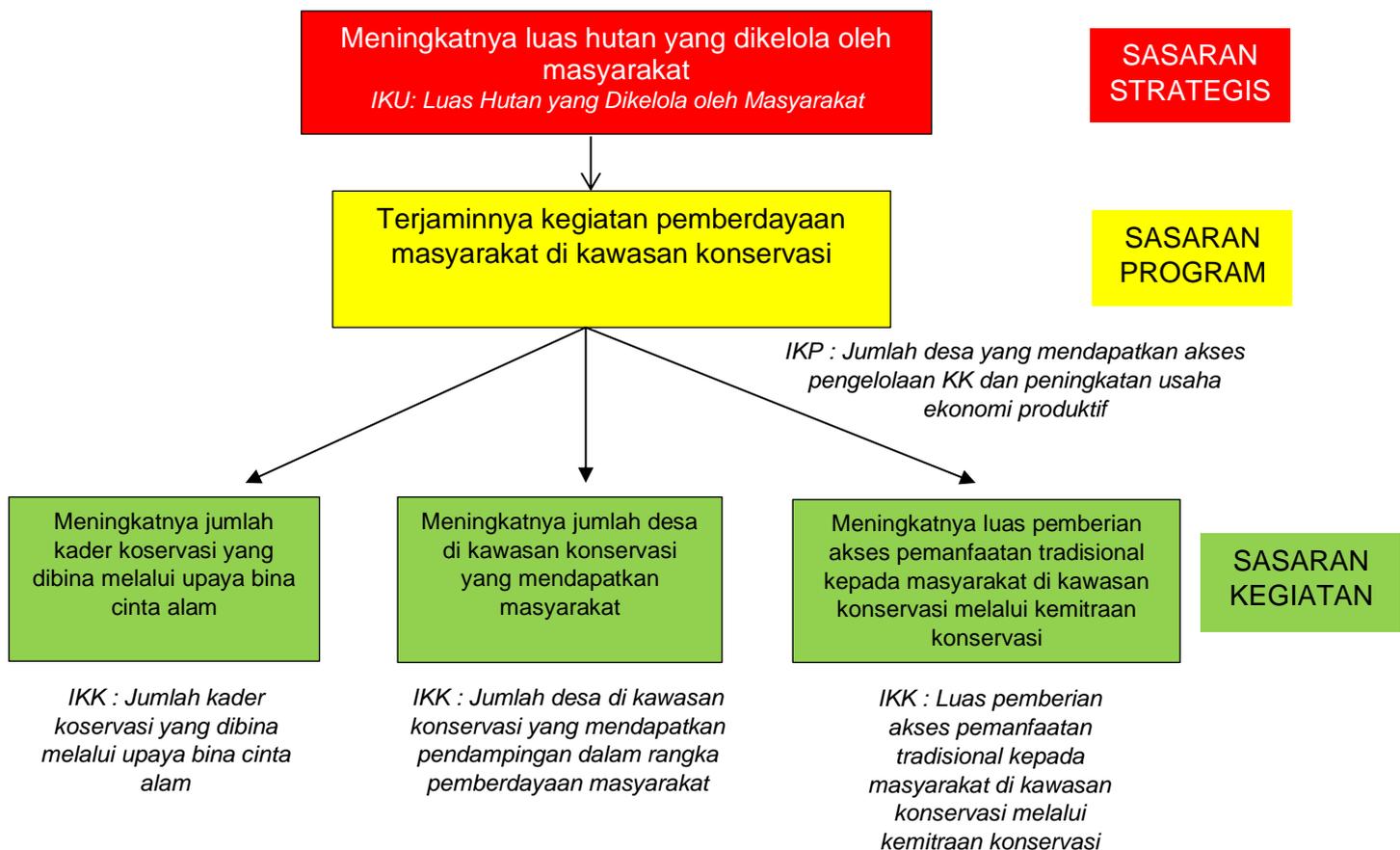


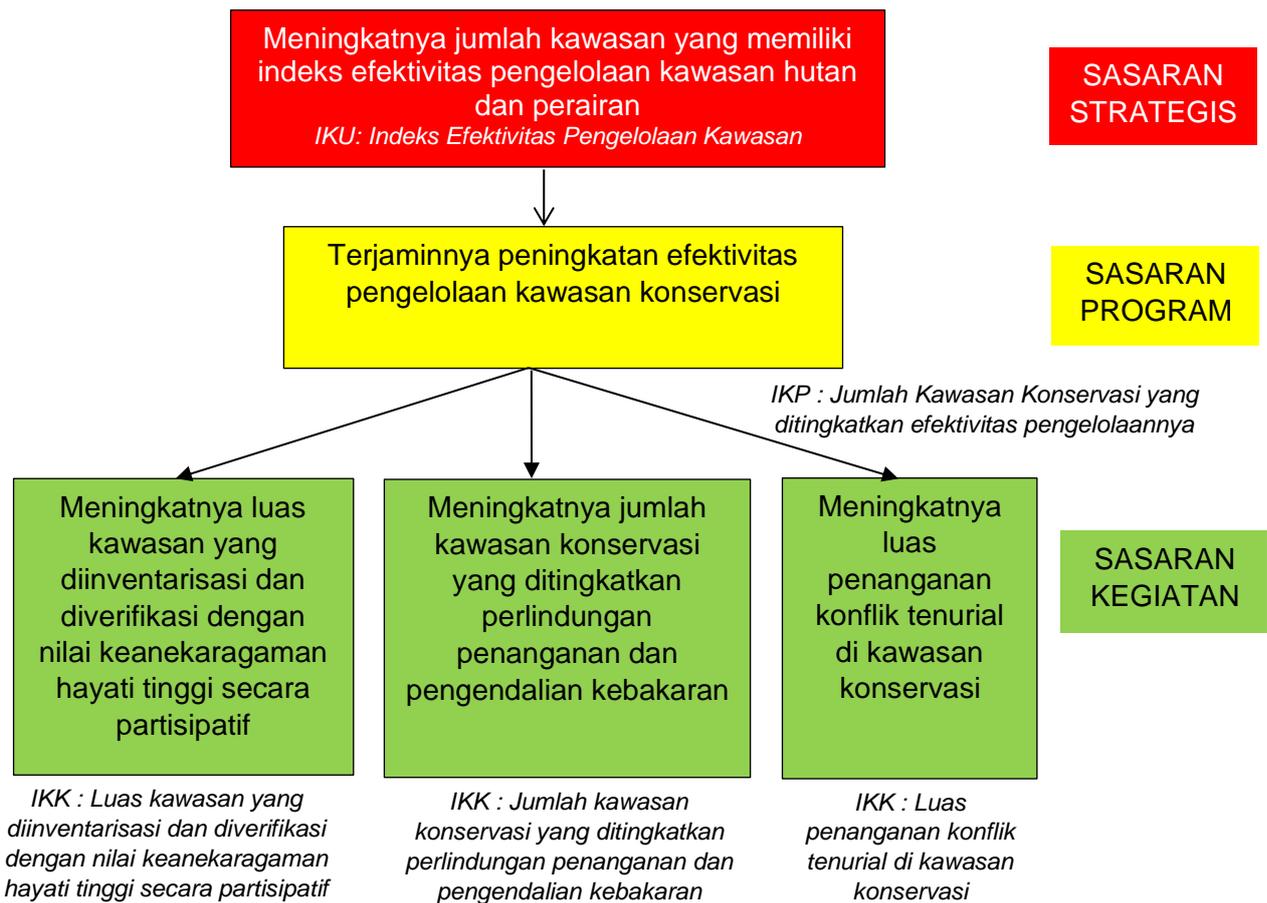


## 2. Perencanaan Kawasan Konservasi



## 3. Pengelolaan Kawasan Konservasi





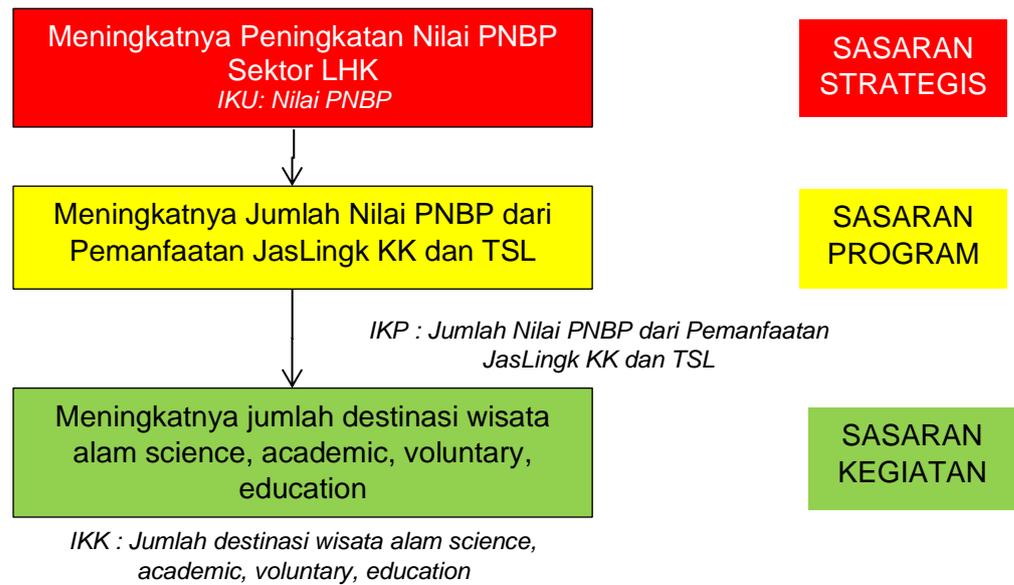
#### 4. Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik



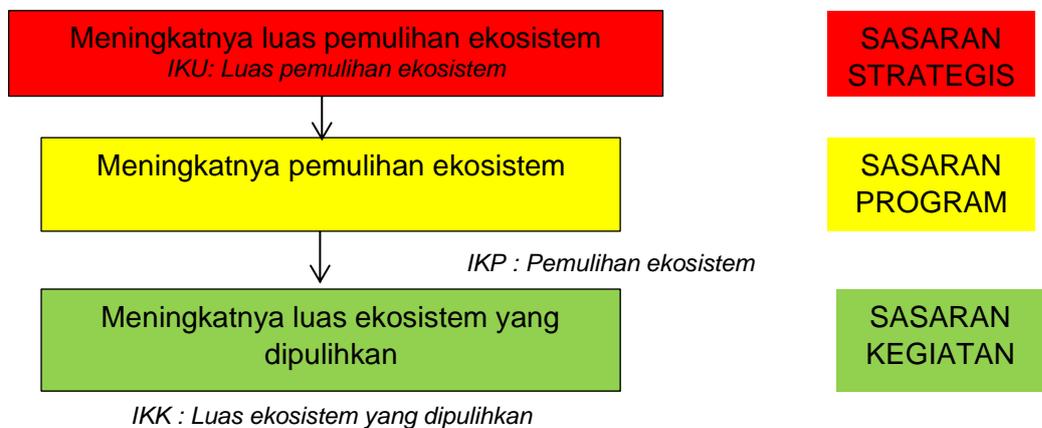




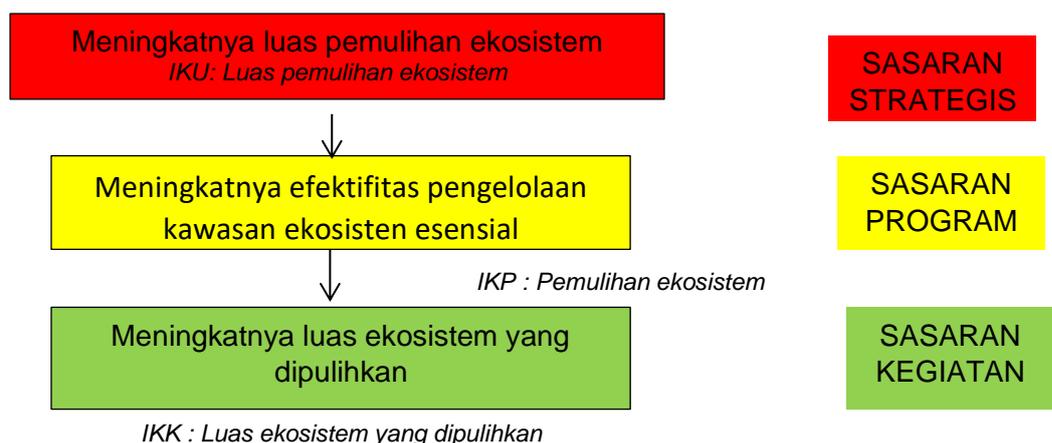
## 5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi



## 6. Pemulihan Ekosistem



## 7. Pembinaan pengelolaan Ekosistem Esensial





“Repatriasi Kura-kura Rote (*Chelodina mccordi*) Tahap 2 Pulangnya Sang Primadona ke Kampung Halaman”

# BAB. 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini, disajikan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun 2023. Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur memuat capaian kinerja beserta analisisnya atas target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja pada Tahun 2023 juga disajikan.

## 3.1. CAPAIAN KINERJA

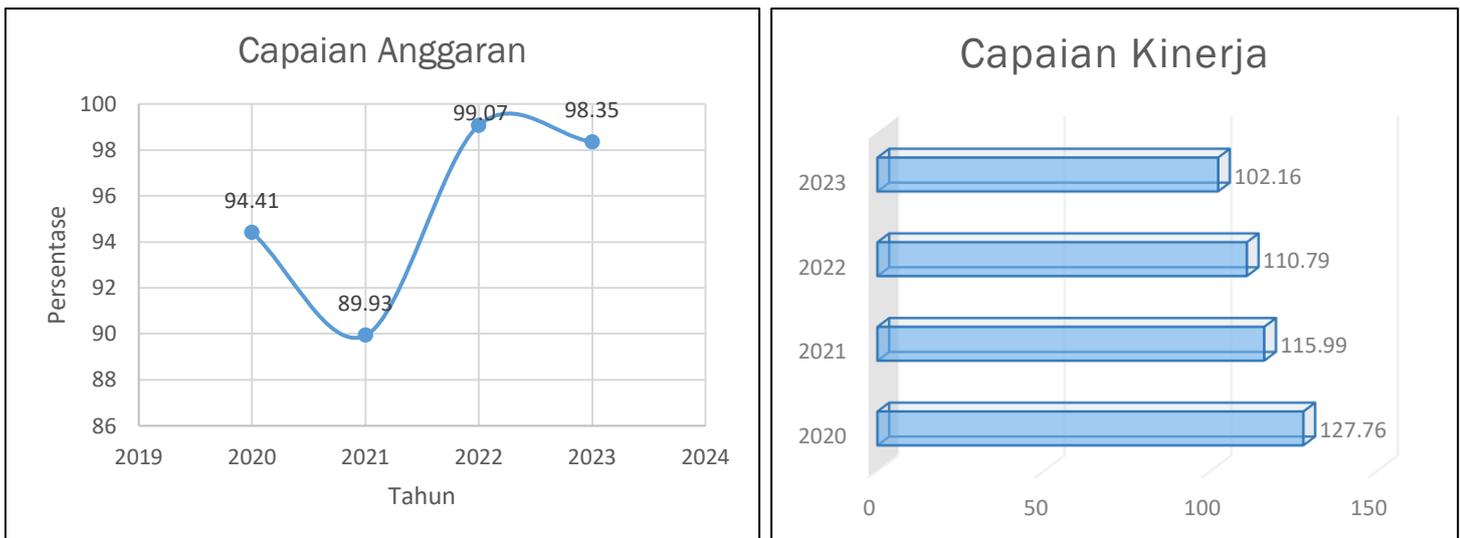
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, maka untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja perlu disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk penyajian laporan dengan menggunakan infografis, foto-foto hasil kegiatan serta narasi yang merupakan analisis perbandingan ataupun analisis yang menjelaskan makna angka-angka hasil capaian tersebut bagi masyarakat (tidak dibatasi hanya pada capaian numeriknya saja), serta perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- 8) Keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact) dari capaian kinerja.
- 9) Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 pada pencapaian kinerja BBKSDA NTT tahun 2023 dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap program dilakukan dengan pengukuran efektivitas dan efisiensi kinerja.

Pada grafik 1 di bawah menunjukkan bahwa capaian kinerja dan capaian anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur tahun 2020 s/d 2023 mengalami perubahan. Capaian kinerja menurun dari 110,79% menjadi 102,16%, begitu juga dengan capaian anggaran yang mengalami penurunan dari 99,07% menjadi 98,35%. Walaupun capaian kinerja 2023 mengalami penurunan bukan berarti capaian kinerja BBKSDA NTT Tahun 2023 kurang memuaskan, mengingat nilai kinerja BBKSDA NTT Tahun 2023 masih mencapai diatas 100%.



Gambar 5. Capaian Anggaran dan Capaian Kinerja BBKSDA NTT Tahun 2020 s/d 2023

### 3.1.1. Analisis Capaian Kinerja

Guna mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja, untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi .

Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar 150% dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Direktorat Jenderal KSDAE.

Untuk menetapkan berhasil tidaknya suatu kegiatan, maka digunakan kriteria skala pengukuran ordinal yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara yaitu:

- Nilai capaian < 55,00% : kategori kurang baik atau TIDAK BERHASIL
- Nilai capaian 56,00% - 70,00% : kategori sedang atau CUKUP BERHASIL
- Nilai capaian 71,00% - 85,00% : kategori baik atau BERHASIL
- Nilai capaian > 86,00% : kategori sangat baik atau SANGAT BERHASIL

Setelah dilakukan analisis pengukuran kinerja, hasil analisis dituangkan dalam Formulir Pengukuran Kinerja sebagaimana pada Tabel 5.

Tabel 5. Formulir Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja Balai Besar KSDA NTT

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET IKK	REALISASI	Prosentase (%)
1	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal KSDAE	1. Nilai SAKIP Ditjen KSDAE	79,5 poin	79,88 poin	100.48
				Maturitas SPIP Ditjen KSDAE	3 Level	3 Level	100.00
						Penyusunan RKAKL dan Renja tahun 2024 (2 DOKUMEN, RKAKL dan RENJA) dan Kerja Sama Penyusunan Laporan Kinerja dan Capaian Renja Tahun 2022 Pengelolaan Data Informasi dan Kehumasan Peningkatan Kapasitas SDM (Dokumen Simpeg) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Pengelolaan PNPB Penyusunan Laporan Keuangan Pelayanan Internal dan Penatausahaan BMN Penyusunan Laporan Pemantauan Kegiatan dan Anggaran guna Mendukung LKJ, LCR, Statistik, SPIP Pembayaran Gaji dan Tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan	

				Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	Penyelenggaraan Laporan Keuangan dengan Opini WTP yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	100.00
2	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Perencanaan Kawasan Konservasi	Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas.	2. Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan di verifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	69.000 hektar	101.469 Hektar	Verifikasi Tutupan Lahan/ Open Area dan Tipe Ekosistem/ on desk (CA Watu Ata, CA Wolo Tadho, dan TWAL Teluk Kupang) Pendataan fasos fasum dan pemukiman dalam CA Ndetak Kelikima dan CA Kemang Boleng Inventarisasi potensi objek kehati tinggi dilaksanakan di CA Wolo Tadho, TWAL GP Teluk Maumere, CA Watu Ata, SM Perhatu, dan CA Mutis Perjalanan dinas menghadiri workshop dan konsultasi FGD pembahasan laporan dan Seminar hasil ekspedisi	147.06
				3. Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	4 Unit KK	4 Unit KK	Kajian Penelitian Lapangan Tim Terpadu ke Daerah untuk Usulan Perubahan Fungsi CA Mutis Rapat Pembahasan Laporan dan Ekspose Hasil Rekomendasi Tim Terpadu Rapat Tim Terpadu bersama Unsur Pemerintah Daerah Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi CA Wae Wuul, CA Wolo Tado Penyusunan RPJPn SM Kateri Sosialisasi Pengelolaan	100.00

							Kawasan Konservasi	
							Ekspose Hasil Rekomendasi Tim Terpadu	
				4. Jumlah Kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	1 Dokumen	3 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Sokka Tama Fiber Nomor PKS.7/K.5/TU/KUM.3/7/2023, 00033/05/OPR/STF/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023</li> <li>- Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT Nomor PKS.15/K.5/TU/KUM.3/9/2023 dan Nomor UM 0102-Bb10/2731 tanggal 20 September 2023</li> <li>- Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PKS.21/K.5/TU/KUM.3/11/2023 dan Nomor PEM.03.01.03/248/2023 tanggal 16 November 2023</li> </ul>	150.00
3	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	5. Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	25 Desa	25 Desa	Perjalanan koordinasi/konsultasi Pelatihan Keterampilan Fasilitasi Masyarakat di Timor dan Flores Bantuan Ekonomi Produktif Penguatan Kapasitas Kelompok Mitra Binaan Bimtek Pemberian Bantuan kepada Masyarakat oleh Komisi IV DPR di Pulau Timor Bimtek Pemberian Bantuan kepada Masyarakat oleh Komisi IV DPR di Pulau Flores	100.00

			6. Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan melalui kemitraan konservasi	1.000 Hektar	1000 Hektar	Sosialisasi dan Pembinaan terhadap Kelompok Kemitraan/ Pemberdayaan Inventarisasi dan Verifikasi Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Pembentukan Kelompok Kemitraan Kajian Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat di Sekitar SM Perhatu	100.00
			7. Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam kawasan konservasi	5 Orang	50 Orang	Pembentukan Kader Konservasi dilaksanakan di TWAL Teluk Kupang 25 orang, di TWA ruteng 13 orang, dan di SM Egon Ilimedo 12 orang Sosialisasi Kader Konservasi Sosialisasi dan kampanye konservasi dalam rangka Hari Bakti Rimbawan	150.00
	Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	8. Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	14 Unit KK	15 Unit KK	Workshop dan Penilaian METT 15 Kawasan Konservasi : 1. CA Watu Ata 2. CA Riung 3. CA Kimang Boleng I 4. CA Kimang Boleng II 5. CA Ndeta Kelikima 6. CA Mutis 7. SM Danau Tuadale 8. SM Kateri 9. SM Perhatu 10. TWA Camplong 11. TWA 17 Pulau 12. TWAL GP Teluk Maumere 13. TWA Baumata 14. TWA Pulau Batang 15. TWA Tuti Adagae Pendampingan SMART Patrol	107.14	
		9. Luas penanganan konflik tenurial	116 Hektar	100 Hektar	Sosialisasi Pengelolaan Kawasan	86.21	

				di kawasan konservasi			Konservasi di TWA Ruteng	
				10. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	30 Unit	28 Unit	Smart Patrol di Kawasan Konservasi (Petugas UPT bersama MMP) Koordinasi, konsultasi dan supervisi Smart Patrol di Kawasan Konservasi (Bersama pihak terkait) Pengurusan Administrasi Senjata Api Patroli Pencegahan/ Pemadaman Kebakaran Hutan Patroli Terpadu bersama Masyarakat dan Pihak/ Instansi terkait lainnya	93.33
4	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman Hayati didalam dan diluar kawasan konservasi	11. Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman Hayati tinggi secara partisipatif	139.444 Hektar	114.000 Hektar	Monitoring Populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning di TWA Menipo (2.449,50 ha) dan SM Harlu (2.262 ha) Monitoring Populasi Komodo di CA Wae Wuul (1.484,85 ha) dan TWAL 17 Pulau (1.703,16 ha) Konservasi Penyu di Pulau Timor Konservasi Penyu di Pulau Flores Monitoring Populasi Komodo di CA Wolo Tadho (4.016,80)	81.75
			Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetic tumbuhan dan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan	12. Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	3 Entitas	3 Entitas	Survei Kuota Tangkap Monitoring dan Evaluasi Izin Pengedar Penilaian Kelayakan Izin/ Keberhasilan Penangkaran dalam Negeri	100,00
			Terjaminnya perlindungan dan Pemanfatan keanekaragaman spesies dan genetik	13. Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	5 Entitas	5 Entitas	Evaluasi Kelayakan Penangkaran di BKW I dan BKW II	100.00

			tumbuhan dan satwa liar secara lestari	14. Jumlah penyelamatan satwa liar	15 Kejadian	17 Kejadian	Sosialisasi/ Respon Konflik Satwa (Buaya Muara/ Komodo, Penyu, Burung, Ular, Paus) Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar (Buaya Muara/ Komodo, Penyu, Burung, Ular, Paus) Penanganan Barang Bukti Temuan, Penyerahan dan Pelepasliaran Satwa Liar	113.33
5	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan kawasan	15. Jumlah Destinasi Wisata Alam Sciene, Academic, Voluntary, Education	1 Destinasi	1 Destinasi	Penyusunan Branding Destinasi dalam rangka promosi wisata alam di Kawasan TWAL 17 Pulau	100.00
6	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pemulihan Ekosistem	Meningkatnya pemulihan ekosistem	16. Luas ekosistem yang dipulihkan	266,17 Hektar	100 Hektar	Kegiatan pemulihan ekosistem dilaksanakan di SM Kateri dengan luasan 100 Ha. Pembiayaan berasal dari DIPA BPDAS Benain Noelmina.	37,57
7	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pembinaan pengelolaan Ekosistem Esensial	Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman Hayati tinggi di luar kawasan konservasi	17. Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman Hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	276,64 Hektar	211 Hektar	Inventarisasi dan Survei Potensi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Terestrial di Pulau Sumba, Flores, dan Sabu Verifikasi Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati Ekspedisi kawasan mutis dan sekitarnya bersama Perguruan tinggi/pecinta alam (4 Kelompok)	76.27
			Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan ekosistem esensial	18. Jumlah kawasan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1 Unit KEE	1 Unit KEE	Dukungan kegiatan Repatriasi Kurakura Rote Tahap II	100.00
<b>RATA-RATA CAPAIAN IKK</b>								<b>102.16</b>

Jumlah Anggaran Kegiatan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2023: Rp 28.904.772.000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2023: Rp 28.426.930.646,- (98,35%)

Capaian kinerja merupakan capaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan persentase rata-rata capaian IKK pada tiap program yang telah dijalankan. Dari informasi yang tersaji pada tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebesar 102,16%. Dari 18 (delapan belas) IKK, semua IKK dapat tercapai.

### 3.1.2. Analisis Efektivitas Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat efektivitas pencapaian kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dilakukan melalui perbandingan nilai capaian kinerja Tahun 2022 dan capaian tahun 2023. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2023. Kriteria efektivitas yang digunakan, yaitu:

a. Rasio  $> 1$ , menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas pencapaian

kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya.

b. Rasio = 1, menunjukkan peningkatan efektivitas pencapaian kinerja Tahun 2023 adalah tetap atau sama dengan kinerja tahun sebelumnya.

c. Rasio  $< 1$ , menunjukkan efektivitas pencapaian kinerja menurun artinya efektivitas kinerja Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan efektivitas kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 6. Efektifitas pencapaian kinerja BBKSDA NTT pada Tahun 2023

Program	Capaian Kinerja (%)		Rasio	Keterangan
	2022	2023		
Dukungan Manajemen; Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	110,79	102,16	0,92	Efektivitas menurun

Tabel 6 di atas menunjukkan rasio pencapaian kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar 0,92 artinya pencapaian target-target kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 mengalami penurunan efektivitas dibanding 2022. Meski demikian bukan berarti capaian kinerja BBKSDA NTT Tahun 2022 kurang memuaskan, mengingat nilai kinerja BBKSDA NTT Tahun 2023 sebesar 102,16%, yang berarti SANGAT BERHASIL.

### 3.1.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui perbandingan antara capaian kinerja atau realisasi fisik (*output*) dengan realisasi masukan (*input*) yang dapat berupa anggaran yang digunakan. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui tingkat efisiensi pencapaian kinerja (penggunaan sumber daya) dan juga efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2023.

Kriteria efisiensi yang digunakan, yaitu :

a) Rasio  $> 1$  atau = 1, menunjukkan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien.

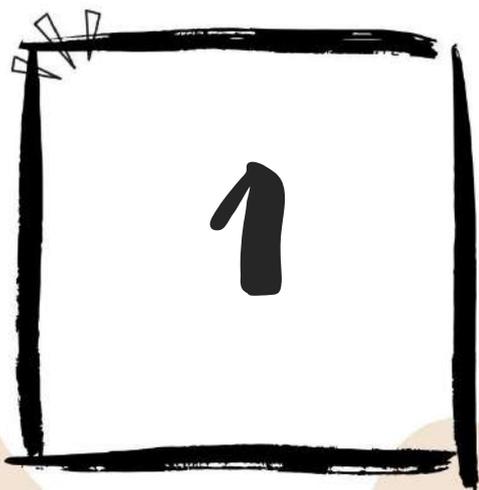
b) Rasio  $< 1$ , menunjukkan penggunaan sumber daya kurang efisien artinya dalam mendukung pencapaian kinerja Tahun 2023 sumber daya (Anggaran) yang digunakan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja Tahun 2023.



Tabel 7. Efisiensi penggunaan anggaran BBKSDA NTT pada Tahun 2023

Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Rasio	Keterangan
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	102,16	98,35	1,04	Efisien

Dari tabel 7 dapat diketahui rasio efisiensi pencapaian kinerja sebesar 1,04. Kondisi ini diartikan bahwa pencapaian kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Satker Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 berjalan secara efisien. Untuk mengetahui permasalahan dan capaian kinerja secara mendalam maka dilakukan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran kinerja dengan indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam PK Tahun 2023. Analisis juga dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja dan dijelaskan pada uraian berikut ini.



**Sasaran Kegiatan :**

*Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal KSDAE*

**Indikator Kinerja Kegiatan :**

1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE
2. Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal KSDAE
3. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal KSDAE yang tertib dan akuntabel

Sasaran kinerja yang ingin dicapai dalam terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian nasional yaitu diukur dengan pencapaian kinerja berupa Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2023 sebesar 79,88 poin. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 5 komponen manajemen kinerja yaitu Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja, Evaluasi kinerja, dan Pencapaian kinerja. Capaian ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 8. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 1.

Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK	Output		Anggaran		
		Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1. Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE	79,5 Poin	79,88 Poin	100.48	21.608.772.000	21.325.247.452	98,69
2. Maturitas SPIP Ditjen KSDAE	3 Level	3 Level	100.00			
3. Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00			

Dari tabel 8 di atas, dapat diketahui bahwa capaian IKK Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 79,5 poin adalah sebesar 100,48%. Anggaran untuk mendukung IKK sasaran kegiatan terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE ini adalah sebesar Rp. 21.608.772.000,- dan direalisasikan sebesar 98,69% atau Rp. 21.325.247.452,-.

Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen KSDAE tahun 2023 dengan tahun sebelumnya terangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 9. Perbandingan nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2022-2023

Indikator Kinerja Kegiatan	2022	2023
Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam	79,12 poin	79,88 poin

Pada tabel 9 di atas, nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2023 mengalami kenaikan dari 79,12 poin menjadi 79,88 poin dibandingkan tahun 2022, dan nilai tersebut mencapai target IKK minimal 79,5 poin.

Tabel 10. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 1

Target IKK	Realisasi Kegiatan	Prosentase (%)
2 Layanan	2 Layanan	100.16
	Penyusunan RKAKL dan Renja tahun 2024 (2 DOKUMEN, RKAKL dan RENJA) dan Kerja Sama	
	Penyusunan Laporan Kinerja dan Capaian Renja Tahun 2022	
	Pengelolaan Data Informasi dan Kehumasan	
	Peningkatan Kapasitas SDM (Dokumen Simpeg)	
	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka Pembangunan Zona Integritas	
	Pengelolaan PNB	
	Penyusunan Laporan Keuangan	
	Pelayanan Internal dan Penatausahaan BMN	
	Penyusunan Laporan Pemantauan Kegiatan dan Anggaran guna Mendukung LKJ, LCR, Statistik, SPIP	
	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	
Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan		

Komponen kegiatan yang mendukung IKK ini adalah (1) penyusunan program, anggaran, evaluasi, data, dan informasi; (2) pengelolaan kepegawaian, jabfung, dan ortala; (3) pengelolaan keuangan dan umum; (4) gaji dan tunjangan; (5) operasional pemeliharaan kantor (keperluan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana kantor, pemeliharaan sarana gedung/ kantor, serta pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor; pembuatan kartu pas bandara, sewa terkait operasional perkantoran, honorarium tenaga kontrak, operasional pemeliharaan satwa di penampungan, operasional resort konservasi wilayah dan pos pengawasan TSL, operasional pajak bumi bangunan (6) Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan

Sebagai upaya melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib administrasi pelaporan maka dilaksanakan penyusunan RKAKL 2024, Rencana Kerja 2023, Laporan Kinerja 2022, Laporan Capaian Renja 2022, Buku Statistik 2022, dan Penyelenggaraan SPIP 2023. Sebagai bentuk perwujudan keterbukaan informasi publik, Balai Besar KSDA NTT mengelola call center dan media sosial.



Balai Besar KSDA NTT sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal KSDAE memiliki target Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem adalah level 3, untuk mewujudkan target IKK tersebut Balai Besar KSDA NTT pada tahun 2023 telah melaksanakan penyelenggaraan SPIP berupa penyusunan Desain SPIP dan Laporan Tahunan SPIP.

Maksud dilaksanakannya pengendalian SPIP BBKSDA NTT tahun 2023 adalah agar sistem pengendalian intern di satuan kerja BBKSDA NTT dapat terselenggara sesuai ketentuan yang berlaku secara lebih praktis. Selanjutnya dengan penerapan desain Penyelenggaraan SPIP maka akan diperoleh pertanggungjawaban yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi satker dalam mengelola keuangan dan perbendaharaan yang diberikan dengan menggunakan prinsip pelaporan dan penggunaan yang akuntabel, transparan serta memadai dalam standard akuntansi yang dipergunakan.



Sedangkan untuk Laporan Keuangan, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya, maka BBKSDA NTT sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan tercapainya 3 Target IKK ini, maka diperoleh hasil berupa peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati, sehingga memberikan dampak untuk melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDAE sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,

Output yang diperoleh dari IKK ini adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE.



Pelayanan Penjualan Tiket Masuk Kawasan TWA Menipo untuk Mendukung Pengelolaan PNBP

# 2

**Sasaran Kegiatan :**  
Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif

Sasaran kegiatan “Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas” diukur dengan beberapa indikator salah satunya berupa luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif. Capaian IKK ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 11. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 2.

Indikator Kinerja Kegiatan	Output			Anggaran		
	Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	69.000 Hektar	101.469 Hektar	147,06	350.000.000	339.492.659	97.00

Dari tabel 11 di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target 69.000 hektar luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif dibutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,-. Realisasi output diperoleh 101.469 hektar (147,06%) dan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 339.492.659,- (97,00%).

Tabel 12. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 2

Target IKK	Realisasi Kegiatan		Prosentase (%)
69.000 Hektar	101.469 Hektar	Verifikasi Tutupan Lahan/ Open Area dan Tipe Ekosistem/ on desk (CA Watu Ata, CA Wolo Tadho, dan TWAL Teluk Kupang)	147.06
		Pendataan fasos fasum dan pemukiman dalam CA Ndeti Kelikima dan CA Kemang Boleng	
		Inventarisasi potensi objek kehati tinggi dilaksanakan di CA Wolo Tadho, TWAL GP Teluk Maumere, CA Watu Ata, SM Perhatu, dan CA Mutis	
		Perjalanan dinas menghadiri workshop dan konsultasi	
		FGD pembahasan laporan dan Seminar hasil ekspedisi	

Dari tabel di atas diketahui bahwa sasaran kegiatan meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas dengan indikator kinerja kegiatan

luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif memiliki prosentase 147,06%. Nilai ini telah menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif adalah verifikasi tutupan lahan/ open area dan tipe ekosistem/ on desk (CA Watu Ata, CA Wolo Tadho, dan TWAL Teluk Kupang), pendataan fasos fasum dan pemukiman dalam CA Ndeti Kelikima dan CA Kemang Boleng, inventarisasi potensi objek kehati tinggi yang dilaksanakan di CA Wolo Tadho, TWAL GP Teluk Maumere, CA Watu Ata, SM Perhatu, dan CA Mutis.



Verifikasi Tutupan Lahan/ Open Area dan Tipe Ekosistem/ On Desk di CA Watu Ata

Wilayah CA Watu Ata merupakan wilayah terestrial dengan ekosistem alami seluas 2821,75 ha atau 63,16% dan ekosistem buatan seluas 1645,93 ha atau 36,84% dari luas seluruh ekosistem yang ada di CA Watu Ata. Ekosistem alami yang ada di CA Watu Ata adalah Hutan Pamah Daratan Rendah (784,24 ha), Hutan Pegunungan Bawah (1310,85 ha), Hutan Pegunungan Atas 213,86 ha dan Savana 512,80 ha. Ekosistem buatan merupakan ekosistem alami yang sudah dirambah. Perubahan dari ekosistem alami adalah bangunan dan permukiman seluas 0,86 ha, belukar 221,43 ha, ladang/kebun 1018,47 ha dan tanaman campuran dan tanaman semusim lainnya 405,17 ha. Terdapat 6 situs budaya penting di dalam kawasan CA Watu Ata yang 2 situs diantaranya merupakan situs rohani. Terdapat 2 spesies penting dilindungi yang ditemukan dalam kawasan yaitu serindit

flores (*Loriculus flosculus*) dan alap-alap (*Falco molusscensis*).

Pada kawasan CA Wolo Tadho, luasan ekosistem alami adalah 4211,83 ha (95,85%) sedangkan ekosistem buatan 182,15 ha (4,15%). Ekosistem alami tersebut meliputi Hutan Pamah / Daratan Rendah, Mangrove, Riparian, Savana, Karst Dataran rendah, Neritik dan Padang Lamun. Di kawasan ini ditemukan beberapa satwa baik secara langsung maupun melalui pemasangan kamera trap di dalam wilayah CA Wolo Tadho. Beberapa satwa dilindungi yang ditemukan adalah komodo (*Varanus komodoensis*), rusa timor (*Rusa timorensis*) dan phyton (*Phyton reticulatus*).



Inventarisasi Potensi Objek Kehati Tinggi di TWAL GP Teluk Maumere

Kegiatan identifikasi dan inventarisasi potensi objek keanekaragaman hayati tinggi di kawasan TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere, diperoleh data tutupan lahan ada open area dan non open area. Tipe ekosistem kelas 4 terdiri dari hutan pamah/daratan rendah, mangrove, padang lamun, neritik, oseanik, savanna dan terumbu karang. Keunikan fenomena alam terdapat danau air asin di pulau Sukun desa samparong, sedangkan keanekaragaman jenis/tumbuhan dan satwa yaitu 21 jenis terumbu karang dari famili acroporidae, 14 jenis lamun dan rumput laut, mamalia laut yang sering dijumpai paus pilot, penyu, lumba-lumba dan duyung. Untuk ikan terdapat 21 jenis ikan yaitu ikan demersal/ikan dasar, ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan perbandingan capaian output dan capaian input dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKK sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 13. Analisis efisiensi pencapaian IKK 2 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Rasio	Keterangan
Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	97,00	147.06	1,52	efisien

Rasio efisiensi penggunaan sumber daya IKK ini di tahun 2023 dengan membandingkan antara capaian output dengan capaian input diperoleh rasio sebesar 1,52 sehingga dapat diindikasikan penggunaan sumberdaya sudah efisien dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023.

Dengan tercapainya IKK ini, maka diperoleh hasil berupa peningkatan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati, sehingga memberikan dampak untuk melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDAE sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. *Output* yang diperoleh dari IKK ini adalah dokumen hasil verifikasi tutupan lahan dan open area serta dokumen hasil inventarisasi potensi keanekaragaman hayati tinggi. *Outcome* yang didapatkan adalah meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas. Dengan hasil *output* dan *outcome* tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan BBKSDA NTT berupa luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi. Selain itu manfaat yang diharapkan adalah masyarakat di sekitar kawasan konservasi dapat diakomodasi dan berperan aktif dalam pengelolaan kawasan konservasi melalui pemetaan permasalahan sehingga potensi konflik dengan masyarakat dapat diminimalisir.





**Sasaran Kegiatan :**  
 Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
 Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi

Sasaran kegiatan “meningkatkan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas” diukur dengan beberapa indikator salah satunya berupa jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi. Capaian IKK ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 14. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 3.

Indikator Kinerja Kegiatan	Output			Anggaran		
	Target IKK	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	4 unit KK	4 unit KK	100.00	700.000.000	696.256.595	99.47

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target 4 unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsinya dibutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. 700.000.000,-. Realisasi output diperoleh 4 unit kawasan konservasi (100,00%) dan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 696.256.595,- (99,47%).

Dari tabel berikut diketahui bahwa sasaran kegiatan IKK 3 diperoleh prosentase 100%. Nilai ini telah menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 15. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 3

TARGET IKK		REALISASI KEGIATAN	%
4 unit KK	4 unit KK	Kajian Penelitian Lapangan Tim Terpadu ke Daerah untuk Usulan Perubahan Fungsi CA Mutis	100.00
		Rapat Pembahasan Laporan dan Ekspose Hasil Rekomendasi Tim Terpadu	
		Rapat Tim Terpadu bersama Unsur Pemerintah Daerah	
		Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi CA Wae Wuul, CA Wolo Tado	
		Penyusunan RPJPn SM Kateri	
		Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi	
		Ekspose Hasil Rekomendasi Tim Terpadu	

Dari tabel di atas diketahui bahwa sasaran kegiatan meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas dengan indikator kinerja kegiatan jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi memiliki prosentase 100,00%. Nilai ini telah menunjukkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

Kajian penelitian lapangan Tim Terpadu dilaksanakan di Cagar Alam Mutis Timau dan Hutan Lindung Mutis Timau yang berada di dua wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Lokasi penelitian berada pada daerah tangkapan air (*catchment area*) atau hulu bagi tiga puluh dua (32) wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) DAS Baun, Benain, Bilit, Biloto, Boti, Fail, Funseku, Leomanu, Metan, Meto, Minsono, Nainunus, Naitlopen, Nainus, Nikotwa, Noelmina, Noemina, Nono Funseku, Nono Oeama, Nuaf Boti, Nuaf Panmolo, Nuaf Panmolo II, Nuaf Panmolo III, Oeana Kot, Oebase, Oebaru, Oekona, Sitoto, Talnae, Temekuna, Tobu dan Tubu Baijulin. Salah satu DAS diantaranya yaitu DAS Noemina merupakan DAS lintas negara dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL).

Pada kawasan CA Mutis Timau tidak ada klaim kepemilikan lahan baik oleh masyarakat maupun oleh pemegang izin sah lainnya atau alokasi kawasan untuk program perhutanan sosial. Masyarakat sekitar mengharapkan kepada pengelola Taman Nasional dapat melibatkan masyarakat setempat dan memprioritaskan perekrutan pegawainya dari masyarakat yang terdampak dan juga anggota kelompok tani yang kehilangan lahan garapannya. Sedangkan di kawasan Hutan Lindung Mutis Timau terdapat program perhutanan sosial, persetujuan penggunaan kawasan hutan dan indikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH). Pada lokasi tersebut tidak direkomendasikan masuk ke dalam rencana Taman Nasional. Usulan perubahan fungsi kawasan hutan CA Mutis Timau dan Hutan

Lindung Mutis Timau menjadi Taman Nasional telah sesuai dengan peraturan perundangan. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, tidak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai untuk perubahan lokasi penelitian menjadi Taman Nasional, namun harus tetap memperhatikan efektivitas pengelolaan, keutuhan kawasan/ ekosistem, dan kepastian hukum. Usulan perubahan fungsi menjadi Taman Nasional dari Kawasan Cagar Alam Mutis Timau yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas ±12.315,61 (Dua Belas Ribu Tiga Ratus Lima Belas dan Enam Puluh Satu Perseratus) Hektar dan Kawasan Hutan lindung Mutis Timau yang terletak di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur direkomendasikan sebagian seluas ±66.473,83 (Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Tiga) Hektar.

Usulan perubahan fungsi Cagar Alam dan Hutan Lindung Mutis Timau menjadi Taman Nasional kemudian disampaikan melalui audiensi kepada Pemerintah Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara yang menyatakan dukungan adanya perubahan fungsi tersebut selama kawasan masih tetap lestari dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya terutama pemanfaatan air dan wisata sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat NTT sangat taat pada aturan sehingga tidak keberatan adanya perubahan fungsi agar pengelolaannya lebih baik dan masyarakat bisa memanfaatkan kawasan untuk ekowisata.



Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kupang



Audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (kiri) dan Timor Tengah Utara (kanan)

Penyusunan RPJP Kawasan CA Wae Wuul disusun berdasarkan mandat penunjukan kawasan yang tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 176/Kpts-II/1985 tanggal 7 Juli 1985 yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutan Nomor 427/Kpts-II/1996 tanggal 9 Agustus 1996 dengan luas 1.484,84 ha. Kawasan Cagar Alam Wae Wuul merupakan aset negara yang harus dikelola dengan optimal agar tercapai kawasan yang lestari sesuai mandat penunjukan dan terwujudnya masyarakat sejahtera. Permasalahan batas kawasan CA Wae Wuul merupakan hal yang prioritas untuk diselesaikan dengan mendorong Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XIV Kupang sebagai unit pelaksana teknis terkait pada Tahun 2025. Mendorong penyusunan mitigasi konflik satwa komodo dengan manusia di sekitar Kawasan Cagar Alam Wae Wuul dengan menyusun Standar Operasional Prosedur dan membentuk Wildlife Rescue Pemanfaatan kawasan untuk kepentingan Kawasan CA Wae Wuul perlu memperhatikan peluang pemanfaatan kawasan melalui wisata alam terbatas atau wisata dengan minat khusus disesuaikan dengan blok peruntukannya untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan.

pembangunan strategis yang tidak dapat terelakkan dapat ditempuh dengan skema Perjanjian Kerja Sama yang disesuaikan dengan blok peruntukannya. Penyusunan RPJP Kawasan CA Wae Wuul perlu



Konsultasi Pembahasan Draft Dokumen RPJP Kawasan CA Wae Wuul dan CA Wolo Tadho dengan Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi

memperhatikan peluang pemanfaatan kawasan melalui wisata alam terbatas atau wisata dengan minat khusus disesuaikan dengan blok peruntukannya untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan

Perlu menindaklanjuti tumpang tindih batas kawasan CA Wae Wuul dengan Batas Kawasan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tabel 16. Analisis efisiensi pencapaian IKK 3 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Rasio	Keterangan
Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	99,47	100	1,00	efisien

Rasio efisiensi penggunaan sumber daya IKK ini di tahun 2023 dengan membandingkan antara capaian output dengan capaian input diperoleh rasio sebesar 1,00 sehingga dapat diindikasikan penggunaan sumberdaya sudah efisien dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023.

*Output* dari kegiatan ini adalah berupa laporan hasil kegiatan penelitian terpadu dalam rangka usulan perubahan fungsi pokok kawasan Cagar Alam dan Hutan Lindung Mutis Timau menjadi kawasan Taman Nasional, dengan dampak (*outcome*) berupa meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas.

# 4

**Sasaran Kegiatan :**

*Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas*

**Indikator Kinerja Kegiatan :**

*Jumlah Kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi*

Sasaran kegiatan “meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas” salah satunya diukur dengan jumlah Kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 17. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 4.

Indikator Kinerja Kegiatan	Output			Anggaran		
	Target IKK	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Jumlah Kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	1 Dokumen	3 Dokumen	150.00	100,000,000	95.672.537	95.67

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target 1 dokumen perjanjian kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi dibutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. 100,000,000,-. Realisasi output diperoleh 3 dokumen (150,00%) dan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 95.672.537,- (95,67%).

Tabel 18. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 4

TARGET IKK	REALISASI KEGIATAN	%
1 dokumen	3 dokumen Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis: - PT Sokka Tama Fiber Nomor PKS.7/K.5/TU/KUM.3/7/2023, 00033/ 05/OPR/STF/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT Nomor PKS.15/K.5/TU/KUM.3/9/2023 dan Nomor UM 0102Bb10/2731 tanggal 20 September 2023 - Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PKS.21/K.5/TU/KUM.3/11/2023 dan Nomor PEM.03.01.03/248/2023 tanggal 16 November 2023	150.00
	Perjalanan koordinasi/konsultasi	

Target kegiatan pada IKK ini adalah perjanjian kerja sama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi.

Dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka Pembangunan Strategis antara BBKSDA NTT dengan PT Sokka Tama Fiber Nomor KS.7/K.5/TU/KUM.3/7/2023, 00033/ 05/OPR/STF/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan berupa Pembangunan Sarana Komunikasi Kabel Fiber Optik Bawah Tanah di Taman Wisata Alam Camplong Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. PT PT Sokka Tama Fiber merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa dan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pembangunan nasional sektor telekomunikasi. Pembangunan sarana komunikasi kabel fiber optik bawah tanah bertujuan untuk meningkatkan layanan telekomunikasi khususnya layanan internet untuk kemajuan pembangunan masyarakat Provinsi NTT sehingga dapat mendukung perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pengelolaan kawasan konservasi di wilayah kerja BBKSDA NTT.



Penandatanganan PKS antara BBKSDA NTT dengan PT Sokka Tama Fiber

Tujuan kerja sama ini adalah untuk mewujudkan penguatan tata kelola fungsi kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati pada TWA Camplong dan mendukung upaya konservasi lainnya di wilayah kerja BBKSDA NTT dengan tetap menjaga keutuhan, kelestarian dan manfaat kawasan konservasi serta meminimalkan dampak langsung maupun tidak langsung akibat kegiatan pembangunan sarana komunikasi

kabel fiber optik bawah tanah di TWA Camplong. PKS ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 25 Juli 2023. Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka Pembangunan Strategis lainnya adalah antara BBKSDA NTT dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT Nomor PKS.15/K.5/TU/ KUM.3/9/2023 dan Nomor UM 0102-Bb10/2731 tanggal 20 September 2023 tentang Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan berupa Penyelenggaraan Jalan Nasional (Eksisting) di Kawasan Taman Wisata Alam Camplong (TWA Camplong), TWA Ruteng, TWA Tuti Adagae, dan Cagar Alam (CA) Watu Ata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional merupakan Unit Pelaksana Teknis Eselon III Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, penerapan sistem mutu dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan, penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan serta keselamatan dan laik fungsi jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Penandatanganan PKS antara BBKSDA NTT dengan Balai Pembangunan Jalan Nasional NTT

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah menjamin keutuhan, kelestarian dan manfaat kawasan TWA Camplong, TWA Ruteng, TWA Tuti Adagae, dan CA Watu Ata maupun mendukung upaya konservasi lainnya pada wilayah kerja BBKSDA NTT serta meminimalkan dampak secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat penyelenggaraan jalan nasional (eksisting) di kawasan BBKSDA NTT. PKS ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 20 September 2023.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka Pembangunan Strategis lainnya adalah antara BBKSDA NTT dengan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PKS.21/K.5/TU/KUM.3/11/2023 dan Nomor PEM.03.01.03/248/2023 tanggal 16 November 2023 tentang Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan dalam rangka Mitigasi Bencana berupa Peningkatan Jaringan Air Bersih di Kawasan Cagar Alam Gunung Mutis Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jaringan pipa air di Cagar Alam Gunung Mutis dibangun pertama kali pada tahun 1994 sepanjang  $\pm 58$  km, dari Desa Bonleu, Kecamatan Tobu sampai dengan Desa Noinbila, Kecamatan Mollo Selatan dimana kondisi saat ini jaringan pipa air dengan panjang  $\pm 6,22$  km yang melintasi kawasan Cagar Alam Gunung Mutis meliputi Desa Bonleu sampai dengan Desa Pubasu, Kecamatan Tobu mengalami kerusakan akibat bencana longsor.



Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk menjamin terwujudnya keutuhan, kelestarian, dan perlindungan sistem penyangga kehidupan di kawasan Cagar Alam Gunung Mutis serta meminimalkan dampak negatif baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari pemanfaatan kawasan Cagar Alam Gunung Mutis untuk peningkatan jaringan air bersih. PKS ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 16 November 2023.

Tabel 19. Analisis efisiensi pencapaian IKK 4 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Rasio	Keterangan
Jumlah Kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	95,67	150	1,57	efisien

Rasio efisiensi penggunaan sumber daya IKK ini di tahun 2023 dengan membandingkan antara capaian output dengan capaian input diperoleh rasio sebesar 1,57 sehingga dapat diindikasikan penggunaan sumberdaya sudah efisien dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023, sumber daya (SDM/Anggaran) yang digunakan sudah sepenuhnya mendukung capaian kinerja tahun 2023.

Dengan tercapainya IKK ini, maka diperoleh hasil output berupa dokumen perjanjian kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan dengan dampak (outcome) berupa pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas, sehingga memberikan dampak untuk melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragamahayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.



**Sasaran Kegiatan :**  
*Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi.*

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
*Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan Masyarakat.*

Sasaran kegiatan “Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi” diukur dengan indikator berupa Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Capaian IKK ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 20. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 5

Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK	Output		Anggaran		
		Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	25 Desa	25 Desa	100.00	1.326.580.000	1.303.581.430	98.27

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target 25 desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif dibutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. 1.326.580.000,-. Realisasi output diperoleh 25 desa (100,00%) dan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 1.303.581.430,- (98,27%).

Tabel 21. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 6

TARGET IKK	REALISASI KEGIATAN		Prosentase (%)
25 Desa	25 desa	Pelatihan Keterampilan Fasilitasi Masyarakat di Timor dan Flores	100.00
		Pembuatan Demplot Budi Daya Lebah Madu di TWA Camplong	
		Pelatihan Pembuatan produk makanan ringan di TWA Camplong	
		Evaluasi keterampilan hasil pelatihan	
		Bantuan Ekonomi Produktif	
		Penguatan Kapasitas Kelompok Mitra Binaan	
		Bimtek Pemberian Bantuan kepada Masyarakat oleh Komisi IV DPR di Pulau Timor	
		Bimtek Pemberian Bantuan kepada Masyarakat oleh Komisi IV DPR di Pulau Flores	

Target output pada sasaran kegiatan IKK 6 adalah sejumlah 25 desa. Untuk mencapai target tersebut Balai Besar KSDA NTT mengelompokkan kegiatan yang akan dilaksanakan menjadi 3, yaitu : (1) Pengembangan kelembagaan/kelompok masyarakat di sekitar kawasan konservasi; (2) Pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat; (3) Pemberian bantuan ekonomi produktif.

Tabel 22. Kelompok Binaan BBKSDA NTT penerima bantuan ekonomi produktif Tahun 2023.

No	Nama Kelompok	Nama Desa
1	KTH Monit	Desa Bena
2	KTH Laime	Desa Nenas
3	KTH Amnautob Fatuneno	Desa Fatuneno
4	Kelompok Masyarakat Dalek Esa	Desa Tanah Merah
5	Kelompok Ekonomi Kreatif Baumata	Desa Baumata
6	Kelompok Konservasi Penyu Cemara	Desa Mata Air
7	kelompok Masyarakat Megu Moong	Desa Mahe
8	Kelompok Tani Sadar Lestari	Desa Wejang Mawe
9	Lembaga Pariwisata Todong Padang	Desa Sambinasi, Desa Sambinasi Tengah dan Desa Sambinasi Barat
10	Kelompok Bersatu Untuk Maju	Desa Rateroru
11	Kelompok Tani Hutan Wae Dinging.	Desa Bangka

Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelompok Mitra Binaan Tahun 2023 yang dilaksanakan di Desa Bena dan di Aula Kantor Dinas Kehutanan Provinsi NTT. Dimana pada Desa Bena dikhususkan untuk Kelompok Tani Hutan Mone Feto Efte, Kelompok Tahat Toen, Kelompok Tani Hutan Monit dan Kelompok Tani Hutan Laime. berdasarkan peluang usaha yang ada, dimana sebagian besar



Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelompok

masyarakat anggota berprofesi sebagai peternak kambing dan nelayan tangkap serta nelayan budidaya. Sedangkan yang dilaksanakan di Kupang dikhususkan untuk kelompok-kelompok masyarakat binaan Balai Besar KSDA yang merupakan kelompok masyarakat yang telah dan atau pernah mempunyai usaha di bidang pengolahan produk. Sehingga kegiatan penyuluhan keamanan pangan merupakan salah satu upaya Balai Besar KSDA NTT dalam meningkatkan kapasitas anggota kelompok. Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Masyarakat nantinya dapat berusaha dan meningkatkan perekonomiannya secara mandiri.

Kegiatan pembuatan demplot lebah madu dilaksanakan di TWA Camplong Pembuatan stup menggunakan papan kayu meranti dengan tujuan agar stup awet, tidak menimbulkan bau/aroma menyengat, dan jenis kayu tersebut mudah diperoleh dengan harga yang sesuai. Ukuran stup, papan dan juga sisir sesuai dengan RPK dengan sedikit modifikasi ukuran, hal tersebut mempertimbangkan ukuran bahan kayu yang ada. Sejumlah 25 stup beserta papan telah selesai

dibuat dan juga sisir sejumlah 8 buah pada setiap stup. Pemasangan telah dilakukan pada lokasi belakang kantor RKW Camplong. Papan nama demplot juga telah dipasang. Lokasi demplot yang berada di dekat kantor resort dapat meningkatkan pemantauan, pengamanan dan pengecekan stup. Lokasi demplot cukup dekat dengan sumber pakan alami lebah, sumber air. Sumber koloni lebah berasal dari sarang alami yang berada di TWA Camplong dan sekitarnya.



Pemasangan Stup dan Papan Nama Demplot Lebah Madu di TWA Camplong



Penyerahan Bantuan Ekonomi Produktif

Tabel 23. Analisis efisiensi pencapaian IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Rasio	Keterangan
Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	98,27	100	1,02	efisien

Rasio efisiensi penggunaan sumber daya IKK ini di tahun 2023 dengan membandingkan antara capaian output dengan capaian input diperoleh rasio sebesar 1,02 sehingga dapat diindikasikan penggunaan sumberdaya sudah efisien dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023.

Dengan tercapainya IKK ini, maka diperoleh hasil berupa peningkatan kapasitas kelompok Masyarakat binaan Balai Besar KSDA NTT, sehingga memberikan dampak untuk terjaminnya pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi.

# 6

**Sasaran Kegiatan :**  
*Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi*

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
*Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan melalui kemitraan konservasi*

Sasaran kegiatan “terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi” diukur dengan beberapa indikator salah satunya berupa luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan melalui kemitraan konservasi. Capaian IKK ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 24. Perbandingan target dan realisasi sasaran IKK 6

Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK	Output			Anggaran	
		Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan melalui kemitraan konservasi	1.000 hektar	1.000 hektar	100.00	607.040.000	545.284.465	89.83

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target 1000 hektar luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan melalui kemitraan konservasi dibutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. 607.040.000,-. Realisasi output diperoleh 1000 hektar (100,00%) dan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 545.284.465,- (89,83%).

Tabel 25. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 6

TARGET IKK		REALISASI KEGIATAN	Prosentase (%)
1.000 hektar	1.000 hektar	Sosialisasi dan Pembinaan terhadap Kelompok Kemitraan/ Pemberdayaan	100.00
		Supervisi kemitraan konservasi di Bidang KSDA Wilayah I dan II	
		Inventarisasi dan Verifikasi Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi	
		Pembentukan Kelompok Kemitraan	
		Kajian Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat di Sekitar SM Perhatu	
		Penanaman GYM bersama Menteri LHK dan Pos Kupang Award 2023	

Target output pada sasaran kegiatan IKK 6 adalah sejumlah 1.000 hektar. Dalam pencapaian target dikelompokkan menjadi 4 kegiatan, yaitu (1) Sosialisasi dan Pembinaan terhadap Kelompok Kemitraan/ Pemberdayaan, (2) Supervisi kemitraan konservasi di Bidang KSDA Wilayah I dan II ; (3) Inventarisasi dan Verifikasi Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi; (4) Pembentukan Kelompok Kemitraan; (4) Kajian Sosial, Ekonomi, dan Budaya Masyarakat di Sekitar SM Perhatu; (5) Penanaman GYM bersama Menteri LHK dan Pos Kupang Award 2023.

Inventarisasi dan Verifikasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi dilaksanakan di Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang khususnya di blok tradisional. Kegiatan dilaksanakan melalui wawancara dengan masyarakat melalui pengisian kuesioner. Selain itu juga dilakukan ground cek area pemanfaatan kawasan. Kuisisioner disebarakan kepada masyarakat yang berbatasan langsung dengan kawasan TWAL Teluk Kupang di Desa Uiasa Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang; Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima dan Kecamatan Alak Kota Kupang. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan para nelayan setempat, dengan jumlah responden 101 orang.

Responden di sekitar kawasan TWAL Kupang memanfaatkan kawasan perairan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup. Sifat perairan yang terbuka untuk semua orang/badan usaha/kelompok untuk mengusahakan sesuatu guna memenuhi berbagai keperluan hidup. Kegiatan inventarisasi dan verifikasi area pemanfaatan kawasan oleh masyarakat sekitar kawasan TWAL Teluk Kupang dilakukan mulai dari area perairan yang berbatasan dengan desa-desa pesisir. Pendataan meliputi pemanfaatan berupa nelayan jaring lampara, pancing dasar, pancing tengah, panah, meting, bagan tancap, pancing dan jaring, pancing rawai dan pancing binjai. Kurangnya pemahaman nelayan tentang kawasan TWAL Teluk Kupang mengindikasikan bahwa sosialisasi keberadaan kawasan ini masih sangat terbatas. Hal ini bertolak belakang dengan fakta dimana umumnya nelayan telah memanfaatkan kawasan TWAL ini sebagai sumber



Wawancara dengan Masyarakat sekitar TWAL Teluk Kupang

utama mata pencaharian mereka. Belum lagi diperparah oleh ketidakfahaman masyarakat pengguna kawasan bahwa tempat mereka beraktifitas sehari-hari adalah kawasan konservasi. Berdasarkan fakta yang demikian maka pendampingan masyarakat nelayan yang beraktifitas di dalam kawasan TWAL Teluk Kupang menjadi hal yang mendesak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Melalui pendampingan berbasis kemitraan maka upaya mewujudkan pelestarian lingkungan di dalam kawasan konservasi ini dapat terwujud dan terlaksana sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.

Pemanfaatan oleh nelayan sekitar Taman Wisata Alam Teluk Kupang dapat dilanjutkan dengan pemberian akses kemitraan konservasi di blok tradisional antara lain nelayan pancing (Pancing dasar, Pancing Tengah, pancing binca) dan nelayan jaring senar atau gillnet dari Kelurahan Kelapa Lima dan Kelurahan Namosain dengan usulan luas area pemberian akses kemitraan konservasi masing-masing 1000 Ha. Kegiatan Pembentukan Kelompok Kemitraan Konservasi dan Pendampingan Permohonan Kemitraan Konservasi dilaksanakan di Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang pada Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Kawasan TWAL Teluk Kupang dalam pengelolaannya dibagi menjadi blok-blok pengelolaan antara lain blok perlindungan, blok pemanfaatan, blok khusus, blok tradisional. Berdasarkan hasil inventarisasi pemanfaatan di TWAL Teluk Kupang, diperoleh data bahwa terdapat nelayan Kelurahan Namosain yang memanfaatkan TWAL Teluk Kupang untuk aktifitas ekonomi (mencari ikan) pada blok tradisional. Guna legalitas mereka dalam akses sumber daya alam TWAL Teluk Kupang yang tidak dilindungi, perlu dilakukan kemitraan konservasi pada blok tradisional.

Kelompok Kemitraan Konservasi di TWAL Teluk Kupang pada Kelurahan Namosain telah terbentuk dengan nama Kelompok Kemitraan Konservasi Lumba-lumba berdasarkan Surat Keputusan Lurah Namosain Nomor: SK.KELNMS.523/121/11/2023 tanggal 30 November 2023. Kelompok Kemitraan Konservasi Lumba-lumba beranggotakan 16 (enam belas) orang yang merupakan nelayan Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, NTT. Kelompok ini bergerak dalam kegiatan konservasi TWAL Teluk Kupang dan juga usaha perekonomian berupa nelayan tangkap di laut TWAL Teluk Kupang area Kelurahan Namosain. Pengurus Kelompok Masyarakat Kemitraan Konservasi Lumba-Lumba dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kepentingan kelompok untuk mendukung konservasi guna menunjang kemajuan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan kelompok Masyarakat.

Tugas-tugas pokok kelompok yaitu: menyusun rencana kerja kelompok dalam rangka peningkatan kesejahteraan kelompok; membuat dan mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan kesejahteraan kelompok; serta membantu dan mendukung Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dalam hal konservasi kawasan Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang. Selain dokumen pembentukan kelompok, juga dilakukan penandatanganan dokumen Kesepakatan Konservasi antara Kepala Balai Besar KSDA NTT dengan Lurah Namosain dalam hal pengakuan kawasan, penjagaan kawasan TWAL Teluk Kupang, serta kesepakatan dalam pemanfaatan kawasan secara tradisional.



Pembentukan Kelompok Kemitraan di TWAL Teluk Kupang



Penanaman Green Youth Movement bersama Menteri LHK

Di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Oilsonbai pada Zona Pemanfaatan blok buah-buahan yang dikelola BPSI LHK Kupang, Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang, telah terselenggara Kegiatan Penanaman Pohon Serentak di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Kepala Badan Standarisasi dan Instrumen LHK Bapak Ir. Ary Sudijanto, M.SE. Turut hadir pada kegiatan ini yaitu Pejabat Gubernur NTT, Komandan KOREM 161/Wira Sakti Kupang, Danlanud Eltari Kupang, Danlantamal VII Kupang, Dinas LHK Prov NTT, Para Kepala UPT KLHK provinsi Nusa Tenggara Timur, DWP UPT KLHK Provinsi NTT, KPH Wilayah Kota Kupang, KPH Wilayah Kab. Kupang, Anggota Pramuka,

Mahasiswa Prodihut Politani Kupang, Polhut, Para Pejabat Pimpinan OPD Provinsi NTT, Green Leadership Indonesia (GLI) dan Green Youth Movement (GYM) yang merupakan generasi muda pecinta lingkungan serta masyarakat sekitar Lokasi Penanaman.

Pada penanaman serentak ini, ditanam sebanyak 1.000 tanaman pada areal seluas 2,5 ha yaitu Kelengkeng; Jambu Kristal; Jambu Bol; Jambu Mente; Kadimbil (merbau sumba) dan Pinang. Pada kesempatan ini pula dilakukan penyerahan petikan SK Menteri LHK tentang Penetapan Green Ambassador yaitu Penyerahan SK Menteri LHK tentang Penetapan Green Ambassador yang merupakan kelanjutan dari Wisuda dan Pengukuhan Green Youth Movement menjadi Green Ambassador yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023 di Jakarta secara luring dan daring, di mana Yth. Ibu Menteri LHK telah mewisuda Green Ambassador sebanyak 1.990 orang yang terdiri dari peserta Green Youth Movement sebanyak 1.979 orang dan 11 orang kader konservasi.

Tabel 26. Analisis efisiensi pencapaian IKK 6 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Rasio	Keterangan
Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan melalui kemitraan konservasi	89,83	100	1,11	efisien

Rasio efisiensi penggunaan sumber daya IKK ini di tahun 2023 dengan membandingkan antara capaian output dengan capaian input diperoleh rasio sebesar 1,11 sehingga dapat diindikasikan penggunaan sumberdaya sudah efisien dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023.

Dengan tercapainya IKK ini, maka diperoleh hasil berupa terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi. Adanya akses tradisional kepada masyarakat di kawasan melalui kemitraan konservasi diharapkan dapat memberikan dampak berkurangnya ketergantungan masyarakat kepada kawasan dan permasalahan kawasan dapat diminimalisir.

**Sasaran Kegiatan :**  
*Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi*

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
*Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam kawasan konservasi*

Sasaran kegiatan “terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi” diukur dengan beberapa indikator salah satunya berupa jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam kawasan konservasi. Capaian IKK ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 27. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 7

Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK	Output		Anggaran		
		Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam kawasan konservasi	5 orang	50 orang	150.00	65.000.000	64.980.000	99.97

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target 5 orang Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam kawasan konservasi dibutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. 65.000.000,-. Realisasi output diperoleh 50 orang (150,00%) dan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 64.980.000,- (99,97%).

Tabel 28. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 7

TARGET IKK	REALISASI KEGIATAN		Prosentase %
5 orang	50 orang	Pembentukan Kader Konservasi dilaksanakan di TWAL Teluk Kupang 25 orang, di TWA ruteng 13 orang, dan di Kabupaten Sikka 12 orang	150.00
		Sosialisasi Kader Konservasi	
		Sosialisasi dan kampanye konservasi dalam rangka Hari Bakti Rimbawan	

Dalam rangka mencapai output sasaran kegiatan terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi, pada tahun 2023 telah dialokasikan kegiatan-kegiatan, yaitu (1) Pembentukan Kader Konservasi; (2) Sosialisasi Kader Konservasi; dan (3) Sosialisasi dan kampanye konservasi dalam rangka Hari Bakti Rimbawan.

Kader Konservasi merupakan unsur penting dalam pembinaan cinta alam karena merupakan unsur pelopor dan penggerak dalam upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta diharapkan dapat berperan aktif bersama pemerintah dalam mewujudkan manusia yang sadar konservasi. Pada tahun 2023, Balai Besar KSDA NTT membentuk kader konservasi sebanyak 50 orang yang berasal dari masyarakat sekitar kawasan TWAL Teluk Kupang, TWA Ruteng, dan Kabupaten Sikka.

Masyarakat sekitar kawasan TWAL Teluk Kupang serta komunitas-komunitas penyelam Kota Kupang turut serta dalam setiap kegiatan penyelamatan terumbu karang di kawasan tersebut. Menyadari pentingnya peranan masyarakat khususnya yang berada di sekitar desa penyangga TWAL Teluk Kupang (kelurahan namosain), Balai Besar KSDA NTT melaksanakan pembentukan kader konservasi yang fokus kegiatannya pada penyelamatan terumbu karang. Anggota yang menjadi kelompok kader konservasi adalah 25 orang yang berasal dari komunitas penyelam dan beraktivitas pada kegiatan-kegiatan konservasi laut (tranplantasi terumbu karang) serta masyarakat yang berdomisili di desa penyangga yaitu Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Terdapat beberapa rangkaian kegiatan dalam Pembentukan Kader Konservasi di TWAL Teluk Kupang yaitu Sosialisasi Kader Konservasi, pemaparan materi terkait “dasar-dasar konservasi”, “transplantasi terumbu karang”, “peraturan perundang-undangan terutama UU No 5 Tahun 1990”, “Pembentukan Kader Konservasi berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No.SK.41/IV-Set/HO/2006”, “konservasi penyusutan” “satwa liar NTT yang dilindungi” dan sharing aktivitas kader konservasi.

Pada kegiatan tersebut berhasil dibentuk Kelompok Pecinta Alam “anana laut” di TWAL Teluk Kupang melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar KSDA NTT Nomor: SK.153/K.5/TU/KUM.1/9/2023 tentang Penetapan Kelompok Pecinta Alam Anana Laut. Dan Kelompok Kader Konservasi melalui Keputusan Kepala Balai Besar KSDA NTT Nomor: SK.154/K.5/TU/KUM.1/9/2023 tentang Penetapan Kader Konservasi Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang.



Pembentukan Kader Konservasi di TWAL Teluk Kupang

Kegiatan pembentukan kader konservasi tingkat pemula di Kabupaten Sikka Tahun 2023 diikuti oleh 12 peserta, yang merupakan anggota kader konservasi yang berasal dari tenaga pendidik, anggota pecinta alam, perwakilan masyarakat dari desa penyangga dan komunitas masyarakat peduli lingkungan. Materi yang disampaikan oleh narasumber dari internal SKW IV dalam kegiatan ini adalah Kebijakan pengelolaan Balai Besar KSDA NTT dan permasalahannya; Kehutanan umum; Keanekaragaman hayati; dan Dasar-dasar konservasi. Diskusi interaktif yang berkenaan dengan materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, para peserta sangat antusias dan semangat mengikuti setiap kegiatan, sehingga para kader konservasi di Kabupaten Sikka, diharapkan dapat menjadi kader-kader konservasi yang lebih aktif dan peduli terhadap hutan dan lingkungannya, serta menjadi pionir yang bersedia bergerak menyebarkan pesan-pesan dan upaya-upaya konservasi pada masyarakat luas di wilayah Kabupaten Sikka.



Pembentukan Kader Konservasi di Kabupaten Sikka

Tabel 29. Analisis efisiensi pencapaian IKK 7 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Rasio	Keterangan
Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam kawasan konservasi	99,97	150	1,50	efisien

Rasio efisiensi penggunaan sumber daya IKK ini di tahun 2023 dengan membandingkan antara capaian output dengan capaian input diperoleh rasio sebesar 1,50 sehingga dapat diindikasikan penggunaan sumberdaya sudah efisien dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023.

*Output* yang didapatkan dari pencapaian ini antara lain jumlah kader konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam yang menghasilkan *outcome* untuk menjamin kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi, sehingga masyarakat dapat terlibat dalam menjaga dan melestarikan kawasan konservasi.



**Sasaran Kegiatan :**  
*Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi*

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
*Jumlah Kawasan Konservasi yang dinilai Efektivitas Pengelolaannya*

Sasaran kegiatan “terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi” diukur dengan beberapa indikator salah satunya berupa jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya. Capaian IKK ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 30. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 8

Indikator Kinerja Kegiatan	Output			Anggaran		
	Target Ikk	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Jumlah Kawasan Konservasi yang dinilai Efektivitas Pengelolaannya	14 unit KK	15 unit KK	107.14	311.430.000	311.426.300	100,00

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target 14 unit kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya dibutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp.311.430.000,-. Realisasi output diperoleh 15 unit KK (107,14%) dan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 311.426.300,- (100,00%).

Tabel 31. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 8

TARGET IKK		REALISASI KEGIATAN	Prosentase %
14 unit	15 unit	Workshop dan Penilaian METT 14 Kawasan Konservasi	100.00
		1. CA Watu Ata	
		2. CA Riung	
		3. CA Kimang Boleng I	
		4. CA Kimang Boleng II	
		5. CA Ndeti Kelikima	
		6. CA Mutis	
		7. SM Danau Tuadale	
		8. SM Kateri	
		9. SM Perhatu	
		10. TWA Camplong	
		11. TWA 17 Pulau	
		12. TWAL GP Teluk Maumere	
		13. TWA Baumata	
		14. TWA Pulau Batang	
		15. TWA Tuti Adagae	
		Pendampingan SMART Patrol	

Dalam rangka mencapai output sasaran kegiatan kawasan konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya, pada tahun 2023 telah dialokasikan kegiatan-kegiatan yang terangkum dalam (1) Workshop dan Penilaian METT, dan (2) Pendampingan SMART Patrol.



Workshop Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan merupakan upaya untuk mengetahui ukuran/ nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi lingkup Balai Besar KSDA NTT dengan menggunakan Metode METT (*Management Effectiveness Tracking Tool*). Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan, dimana hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan masukan mengenai perbaikan yang perlu dilakukan. Penilaian akan dilakukan terhadap elemen-elemen utama yang berperan penting dalam siklus pengelolaan.

Penilaian METT pada tahun 2023 meliputi 15 (lima belas) kawasan konservasi yaitu CA Watu Ata, CA Riung, CA Kimang Boleng I, CA Kimang Boleng II, CA Ndeta Kelikima, CA Mutis, SM Danau Tuadale, SM Kateri, SM Perhatu, TWA Camplong, TWA 17 Pulau, TWAL GP Teluk Maumere, TWA Baumata, TWA Pulau Batang, dan TWA Tuti Adagae. Terdapat peningkatan nilai METT yang terungkit dari aspek perencanaan kawasan dan pemenuhan sarana prasarana pengelolaan kawasan.

Kegiatan Workshop METT Dapat menambah keterampilan peserta dimana peserta sudah mendapatkan materi dari berbagai Narasumber mulai dari Pengelolaan kawasan lingkup Balai Besar KSDA NTT, Pengantar Penilaian METT, Materi dari Perencanaan Kawasan Konservasi, Aplikasi SmartPatrol dan Penenalan TSL Melalui Aplikasi Inaturalist serta peningkatan pengelolaan media sosial untuk meningkatkan promosi kawasan. Peningkatan pengelolaan kawasan dengan metode METT, adapun hasil penilaian METT yang dilai efektifitasnya mencapai 70 % adalah Sebagai berikut: kawasan CA Watu Ata 70 %, TWA Camplong 77 %, TWA 17 Pulau 76%, TWA Baumata 77 % dan yang perlu ditingkatkan adalah kawasan SM Kateri 64 %, dan kawasan SM Danau Tuadale 60 %.

Kegiatan lain dalam pencapaian IKK ini adalah pendampingan SMART Patrol yang dilaksanakan di Cagar Alam Mutis. Tujuannya adalah agar pelaksanaan kegiatan SMART Patrol dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pada kawasan CA Mutis, lokasi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Nuapin, Padang Lelofui, dan Noepesu. Dalam pelaksanaannya, tim melakukan patroli bersama petugas Resort Fatumnasi, Resort Eban, anggota MMP CA Mutis, dan ketua adat setempat. Selain pelaksanaan patroli di dalam kawasan CA Mutis, juga dilakukan patroli pengawasan peredaran TSL di Desa Naekake Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara. Terdapat informasi dari masyarakat bahwa adanya kepemilikan satwa liar jenis Kuskus (*Phalanger orientalis*). Sosialisasi terkait TSL (peraturan perundang-undangan dan tata usaha peredaran TSL) diberikan kepada pemilik satwa tersebut. Satwa kuskus kemudian diserahkan kepada petugas dan diamankan di Kantor Resort Eban dan kemudian dibawa ke Kantor Bidang KSDA Wilayah I Soe sebelum dilepasliarkan kembali di habitat alaminya yaitu di kawasan CA Mutis.



Pendampingan SMART Patrol di CA Mutis

Tabel 32. Analisis efisiensi pencapaian IKK 8 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Rasio	Keterangan
Jumlah kawasan konservasi yang dinilai Efektivitas Pengelolaannya	100,00	100,00	1,00	efisien

Rasio efisiensi penggunaan sumber daya IKK ini di tahun 2023 dengan membandingkan antara capaian output dengan capaian input diperoleh rasio sebesar 1,00 sehingga dapat diindikasikan penggunaan sumberdaya sudah efisien dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023.

*Output* yang didapatkan dari pencapaian ini antara lain pengelolaan kawasan konservasi BBKSDA NTT yang lebih efektif sehingga mampu memberikan *outcome* untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam yang ada seperti potensi TSL dan jasa lingkungan, sehingga dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.



**Sasaran Kegiatan :**  
*Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi*

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
*Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi*

Sasaran kegiatan “terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi” diukur dengan indikator berupa luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 33. Perbandingan target dan realisasi sasaran IKK 9

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Ikk	Output		Anggaran		
		Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	116 Hektar	100,7 Hektar	86,81	80.000.000	79,867,600	99.80

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target 116 Hektar Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi dibutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- Realisasi output diperoleh 100,7 Hektar (86,81%) dan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 79,867,600,- (99.80%).

Tabel 34. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 9

TARGET IKK	REALISASI KEGIATAN		Prosentase (%)
116 Hektar	100,7 Hektar	Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi di TWA Ruteng	86,81

Masalah tenurial memang menjadi masalah utama di TWA Ruteng, berdasarkan hasil pengukuran daerah perambahan di TWA Ruteng diketahui terdapat 100,7 Ha areal perambahan. Salah satu kegiatan agar meminimalisir perambahan yaitu dengan kegiatan sosialisasi pengelolaan kawasan di TWA Ruteng dengan beberapa hasil kesepakatan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Ruteng memiliki potensi keanekaragaman sumber daya alam hayati tinggi yang menjadi hak dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestariannya; Hutan Konservasi dan segala isinya yang ada di Taman Wisata Alam Ruteng merupakan aset bersama masyarakat Manggarai Timur sehingga kelestariannya juga menjadi hak dan tanggung jawab bersama; Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Ruteng sebagai bagian dari ruang hidup orang Manggarai Timur yang memiliki batas dan larangan yang sudah ada sejak nenek moyang mengakui keberadaan hutan/puar/poong/poco. Secara tradisional kepercayaan atau adat Masyarakat Manggarai Timur selaras dengan aturan konservasi, hutan sebagai tempat keramat yang juga merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Manggarai Timur.



Tabel 35. Analisis efisiensi pencapaian IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Rasio	Keterangan
Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	99,80	86,81	1,11	efisien

Rasio efisiensi penggunaan sumber daya IKK ini di tahun 2023 dengan membandingkan antara capaian output dengan capaian input diperoleh rasio sebesar 1,11 sehingga dapat diindikasikan penggunaan sumberdaya efisien dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023.



10

**Sasaran Kegiatan :**  
*Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi*

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
*Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran*

Sasaran kegiatan “terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi” diukur dengan beberapa indikator salah satunya berupa jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran. Capaian IKK ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 36. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 10

Indikator Kinerja Kegiatan	Output			Anggaran		
	Target Ikk	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	30 unit	28 unit	93.33	1,528,570,000	1,503,521,687	98,4

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target 30 unit jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran dibutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. 1,528,570,000,-. Realisasi output diperoleh 28 unit kawasan konservasi (93,33%) dan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 1,503,521,687,- (98,4%).

Tabel 37. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 10

TARGET IKK		REALISASI KEGIATAN	Prosentase %
30 unit	28 unit	Smart Patrol di Kawasan Konservasi (Petugas UPT bersama MMP) pada 28 kawasan	93,33
		Koordinasi, konsultasi dan supervisi	
		Smart Patrol di Kawasan Konservasi (Bersama pihak terkait) pada 28 kawasan	
		Pengurusan Administrasi Senjata Api	
		Patroli Pencegahan/ Pemadaman Kebakaran Hutan pada 28 kawasan	
		Patroli Terpadu bersama Masyarakat dan Pihak/ Instansi terkait lainnya pada 28 kawasan	

Dalam rangka mencapai output sasaran kegiatan terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, pada tahun 2023 telah dialokasikan kegiatan-kegiatan yang terangkum dalam (1) Smart Patrol di kawasan konservasi (Petugas UPT bersama MMP); (2) Koordinasi, konsultasi dan supervisi; (3) Smart Patrol di Kawasan Konservasi (Bersama pihak terkait); (4) Pengurusan Administrasi Senjata Api; (5) Patroli Pencegahan/ Pemadaman Kebakaran Hutan; dan (6) Patroli Terpadu bersama Masyarakat dan Pihak/ Instansi terkait lainnya.

Kegiatan patroli di kawasan konservasi dilaksanakan dengan menggunakan SMART atau Spatial Monitoring and Reporting Tool yang berbasis resort sebagai unit pengelolaan terkecil di tingkat tapak. Setiap resort melaksanakan patroli rutin sebanyak dua kali untuk memantau monitoring kondisi pal batas, pengambilan data potensi sebaran satwa liar dan tumbuhan, pengambilan data potensi jasa lingkungan, monitoring gangguan terhadap kawasan, serta pengambilan data sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Dalam kegiatan patroli ini juga disertai anjongsana kepada masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan dan anjangkarya kepada masyarakat yang tengah beraktivitas di dalam hutan konservasi. Anjongsana dan anjangkarya ini media petugas untuk sosialisasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem sekaligus memperoleh informasi dari masyarakat.



Patroli Rutin di TWA Ruteng



Patroli bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) di Suaka Margasatwa Ale Aisio

Patroli rutin juga dilakukan oleh petugas resort bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) pada 28 kawasan konservasi. MMP adalah kelompok masyarakat sekitar hutan yang membantu Polhut dalam pelaksanaan perlindungan hutan dibawah koordinasi, pembinaan dan pengawasan instansi pembina. (Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P4.56/Menhut-II/2014 Tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan). Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) diimplementasikan dalam bentuk patroli di 23 Resort Konservasi Wilayah (RKW). Selain itu, patroli juga dilaksanakan dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya seperti TNI dan Polri.



Patroli Terpadu bersama Pihak Terkait (TNI Polri) di Cagar Alam Hutan Bakau Maubesi

Kawasan konservasi tidak lepas dari gangguan baik alami maupun buatan, salah satunya adalah adanya kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering terjadi pada musim kemarau terutama pada kawasan yang sering terdapat hotspot. Patroli pencegahan/ pemadaman kebakaran hutan dilaksanakan di 28 kawasan konservasi.



Patroli Pemadaman Kebakaran Hutan di Cagar Alam Mutis

Realisasi dalam sasaran kegiatan ini salah satunya adalah dengan pengurusan administrasi senjata api. Maksud dalam kegiatan ini adalah untuk melakukan test psikologi dan tes kesehatan dalam rangka perpanjangan pengurusan Ijin Pemegang Senjata Api bagi personil Polisi Kehutanan BBKSDA NTT. Tujuannya adalah untuk mendapatkan Ijin Kartu Pemegang Senjata Api. Rangkaian kegiatannya adalah test psikologi dilaksanakan di Aula BBKSDA NTT yang dilakukan oleh Tim Psikologi dari Biro SDM Polda NTT dan test kesehatan di RSB Titus Uly Kupang.

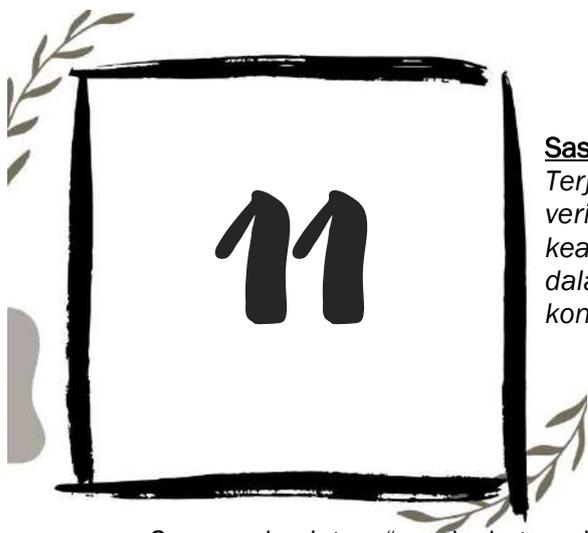


Tabel 38. Analisis efisiensi pencapaian IKK 10 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Rasio	Keterangan
Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	98,4	93,33	1,05	efisien

Rasio efisiensi penggunaan sumber daya IKK ini di tahun 2023 dengan membandingkan antara capaian output dengan capaian input diperoleh rasio sebesar 1,05 sehingga dapat diindikasikan penggunaan sumberdaya sudah efisien dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023.

*Output* yang didapatkan dari pencapaian ini antara lain pengelolaan kawasan konservasi BBKSDA NTT yang lebih efektif sehingga mampu memberikan *outcome* untuk melindungi dan melestarikan sumber daya alam yang ada seperti potensi tumbuhan dan satwa liar dan jasa lingkungan, sehingga kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya dapat lestari dan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.



**Sasaran Kegiatan :**

Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi

**Indikator Kinerja Kegiatan :**

Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif

Sasaran kegiatan “meningkatkan kawasan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi sebagai ruang perlindungan keanekaragaman hayati spesies dan genetik tinggi di dalam dan di luar kawasan konservasi” diukur dengan indikator berupa Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif. Capaian IKK ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 39. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 11

Indikator Kinerja Kegiatan	Output			Anggaran		
	Target Ikk	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	139.444 Hektar	114.000 Hektar	81.75	509.770.000	473.836.916	92.95

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target 114.000 hektar luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif dibutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. 509.770.000,-. Realisasi output diperoleh 114.000 hektar (100,00%) dan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 473.836.916,- (92,95%).

Tabel 40. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 11

TARGET IKK		REALISASI KEGIATAN	Prosentase (%)
139.444 Hektar	114.000 Hektar	Monitoring Populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning di TWA Menipo (2.449.50 ha) dan SM Harlu (2.262 Ha)	81.75
		Monitoring Populasi Komodo di CA Wae Wuul (1,484.85) dan TWAL 17 Pulau (7.303.16)	
		Konservasi Penyu di Pulau Timor	
		Konservasi Penyu di Flores	
		Monitoring Populasi Komodo di CA Wolo Tadho (4.016,80)	

TARGET IKK	REALISASI KEGIATAN	Prosentase (%)
	Survey Potensi TSL terkait dasar usulan kuota pemanfaatan	
	Monitoring Populasi Komodo di HL Pota dan KEE Pulau Longos	
	Monitoring Populasi Komodo di Torong Padang	
	Monitoring Komodo di Golo Lijun dan Bawe	
	Konservasi Penyu Flores (Identifikasi lokasi pendaratan penyu di TWAL Teluk Maumere)	

Dalam rangka mencapai target sasaran kegiatan IKK ini, kegiatan yang dilaksanakan meliputi: (1) Intervensi manajemen TSL di dalam kawasan konservasi; (2) Intervensi manajemen TSL di luar kawasan konservasi;

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen KSDAE KLHK) telah menetapkan spesies prioritas untuk ditingkatkan di Indonesia dalam SK Dirjen KSDAE No. 180/IV-KKH/2015 tentang Penetapan 25 Satwa Terancam Punah Prioritas untuk Ditingkatkan Populasinya Sebesar 10% pada Tahun 2015-2019.

Kegiatan intervensi manajemen TSL dilakukan melalui monitoring populasi kakatua kecil jambul kuning di SM Harlu dan TWA Menipo, konservasi penyu di Pulau Timor dan Pulau Flores, dan monitoring populasi komodo di CA Wae Wuul dan TWAL Tujuh Belas Pulau.



Gambar 6. Grafik Populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning di SM Harlu 2011-2023



Burung Kakatua Kecil Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*) sedang bertengger pada SM Harlu (kiri) dan di TWA Menipo (kanan)

Satwa berikutnya yang menjadi mandat Balai Besar KSDA NTT adalah biawak komodo. Menurut Auffenberg (1981) penyebaran Komodo meliputi Pulau Flores bagian barat, Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, Gilimotang dan Pulau Mada Sumbi. Penyebaran di Pulau Flores ada 2 bagian yaitu di bagian barat Pulau Flores mulai dari Labuan Bajo hingga Nangalili dan di bagian Pantai Utara mulai dari Dampek sampai sebelah barat Riung. Di wilayah Balai Besar KSDA NTT beberapa kawasan konservasi merupakan habitat satwa tersebut, yaitu : CA Wae Wuul dan TWAL 17 Pulau.

Monitoring populasi satwa biawak Komodo ini sangat perlu dilakukan untuk mengetahui keberadaan dan memperkirakan populasi satwa biawak komodo saat ini di alam khususnya di CA Wae Wuul dan TWAL Tujuh Belas Pulau. Data dan informasi yang diperoleh melalui kegiatan ini akan digunakan dalam pengelolaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan satwa biawak Komodo.



Pemasangan kamera trap (kiri) dan Foto Bersama Team Monitoring Komodo (kanan)

Konservasi penyu telah dilaksanakan sejak tahun 2006 melalui Keputusan Kepala Balai KSDA NTT Nomor: SK. 109/IV-K.19/2006 tanggal 30 Juni 2006 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelestarian Penyu di TWA Menipo dan TB Bena. Konservasi penyu di kedua kawasan tersebut dilakukan selama 12 bulan, dengan metode semi alami, pemasangan tagging pada penyu yang mendarat dan bertelur, monitoring wilayah pantai pendaratan, serta pencatatan frekuensi pendaratan dan penetasan penyu.

Untuk Intervensi manajemen TSL di luar kawasan konservasi, dilaksanakan melalui monitoring biawak komodo (KEE Hutan Lindung Pota, KEE Pulau Longos, Torong Padang, Golo Lijun dan Bawe),

Tujuan monitoring yaitu untuk mendapatkan data/informasi:

1. Update kondisi sebaran Komodo pada site monitoring
2. Estimasi proporsi area hunian (site occupancy) dan peta hunian

3. Estimasi kepadatan Komodo
4. Estimasi kelimpahan Komodo pada area monitoring
5. Analisis tren site occupancy, kepadatan, kelimpahan berdasarkan data time series pada site monitoring
6. Identifikasi jenis dan ketersediaan satwa mangsa
7. Identifikasi keberadaan satwa predator pesaing

Desain sampling ditentukan sedemikian rupa agar hasil pengamatan benar-benar akurat mewakili seluruh area yang dikaji (habitat Komodo), sehingga peletakan kamera trap dengan pertimbangan atau merupakan representasi:

1. Lokasi yang diduga terdapat Komodo (habitat yang disukai Komodo yaitu kombinasi ekosistem savana dan tegakan hutan, sepanjang 5-6 km dari pantai)
2. Lokasi yang diduga tidak terdapat Komodo (negative control, dengan jumlah minimal sebanyak 10% dari jumlah sampling)
3. Lokasi perjumpaan berdasarkan Informasi dari masyarakat
4. Menggunakan grid yang diletakan pada *core area homerange* Komodo dengan kisaran seluas 1 Km<sup>2</sup>

Tabel 41. Analisis efisiensi pencapaian IKK 11 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Rasio	Keterangan
Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	92.95	81.75	0,87	Kurang efisien

Rasio efisiensi penggunaan sumber daya IKK ini di tahun 2023 dengan membandingkan antara capaian output dengan capaian input diperoleh rasio sebesar 0,87 sehingga dapat diindikasikan penggunaan sumberdaya sudah efisien dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023.

Dengan tercapainya IKK ini, maka diperoleh hasil berupa terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi. Diharapkan agar kedepannya bisa ditingkatkan nilai efisiensi guna meningkatkan terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi.



12

**Sasaran Kegiatan :**

Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan

**Indikator Kinerja Kegiatan :**

Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL

Sasaran kegiatan “Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan” diukur dengan beberapa indicator, salah satunya berupa Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL. Capaian IKK ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 42. Perbandingan target dan realisasi sasaran IKK 12

Indikator Kinerja Kegiatan	Output			Anggaran		
	Target Ikk	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	3 Entitas	3 Entitas	100	80,000,000	76,611,880	95.76

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target 5 lembaga jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL dibutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. 80,000,000,- Realisasi output diperoleh 3 Entitas (100 %) dan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 76,611,880,- (95.76%).

Tabel 43. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 12

TARGET IKK		REALISASI KEGIATAN	Prosentase (%)
3 Entitas	3 Entitas	Survei kuota tangkap	100%
		Monitoring dan evaluasi izin pendedar (3 izin pendedar, sekaligus - Pembuatan BAP)	
		Penilaian kelayakan izin/ keberhasilan penangkaran dalam negeri (2 pemegang ijin)	

Target yang ditetapkan dalam output ini adalah 3 Entitas, dengan rincian kegiatan terdiri atas : (1) monitoring dan evaluasi izin pendedar; (2) penilaian kelayakan izin/keberhasilan penangkaran dalam negeri; (3) survei kuota tangkap.

Kegiatan monitoring dan evaluasi izin pendedar, serta peniaian kelayakan izin/keberhasilan penangkaran dalam negeri dilaksanakan dengan sasaran yaitu UD Milan. Adapun - Jenis yang diusahakan berupa bagian cangkang (mati).

Dasar pengambilan/penangkapan sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Besar KSDA NTT Nomor: 56/K.5/BIDTEK/KUM.1/3/2023 tentang Pemberian Izin Pengambilan dan Pengumpulan Lola Merah (*Rochia nilotica*) dan Batu Laga (*Turbo marmoratus*) yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang dari habitat alam kuota tahun 2023 UD. Milan tanggal 31 Maret 2023. UD. Milan masih belum memiliki papan nama Perusahaan sehingga kedepannya perlu untuk membuat papan nama perusahaan yang tertera nama perusahaan, alamat tempat usaha. Selain UD Mila 2 Entitas lain yaitu CV Yulia Indah dan UD Molusca.



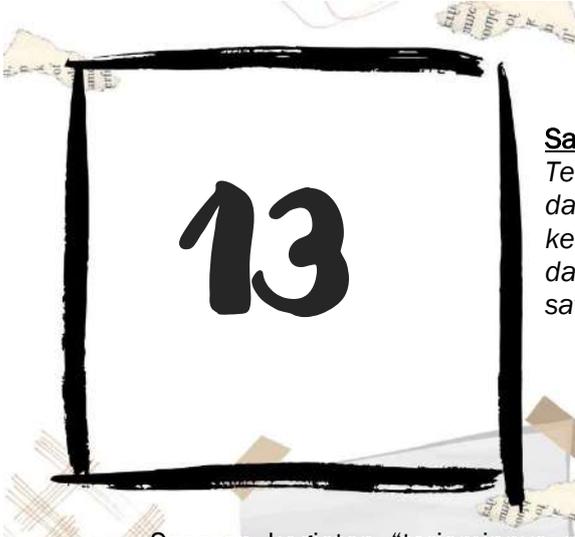
Pemeriksaan jenis yang diusahakan berupa bagian cangkang (mati) dari Lola Merah (*Rochia nilotica*) dan Batu Laga (*Turbo marmoratus*)

Sedangkan untuk kegiatan survey kuota tangkap sendiri memiliki maksud sebagai dasar usulan kuota pemanfaatan pada tahun 2024 untuk Jenis Teripang yang masuk dalam Appendiks CITES di Kota Kupang Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote. Dengan tujuannya adalah mengetahui potensi pemanfaatan teripang yang masuk dalam daftar Appendiks CITES.

Tabel 44. Analisis efisiensi pencapaian IKK 12 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Rasio	Keterangan
Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	95.76	100	1,04	efisien

Rasio efisiensi penggunaan sumber daya IKK ini di tahun 2023 dengan membandingkan antara capaian output dengan capaian input diperoleh rasio sebesar 1,04 sehingga dapat diindikasikan penggunaan sumberdaya efisien dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023.



13

**Sasaran Kegiatan :**  
*Terjaminnya perlindungan dan Pemanfatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari*

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
*Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL*

Sasaran kegiatan “terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari” diukur dengan indikator berupa jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL. Capaian IKK ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 45. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 13

Indikator Kinerja Kegiatan	Output			Anggaran		
	Target Ikk	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	5 Entitas	5 Entitas	100.00	109,200,000	106,991,603	98.00

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target 5 entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL dibutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. 109,200,000,-. Realisasi output diperoleh 5 entitas (100,00%) dan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 106,991,603,- (98,00%).

Tabel 46. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 13

TARGET IKK		REALISASI KEGIATAN	Prosentase (%)
5 Entitas	5 Entitas	Evaluasi kelayakan penangkaran di wilayah BKW I	100.00%
		Evaluasi kelayakan penangkaran di wilayah BKW II	

Target yang ditetapkan dalam output ini adalah lima entitas, dengan rincian kegiatan terdiri atas: (1) evaluasi kelayakan penangkaran di BKW I; dan (2) evaluasi kelayakan penangkaran di BKW II.

Kegiatan evaluasi kelayakan penangkaran di BKW I dilaksanakan dengan sasaran pemilik atas nama Kurniawan, Mohamad Dasuki, Ali Amran, SH, Riyadi Nugroho, S.IK, Yulianus Lau, Servasius Djaminta, Balitbang LHK Kupang dan Subagyo Sumarsono (Kota Kupang dan Kabupaten Kupang), Hj. Ardani Laduma dan Drs. Leonard Haning MM (Kabupaten Rote Ndao).

Evaluasi kelayakan penangkaran rusa timor di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang dimulai dengan mensosialisasikan perizinan penangkaran Rusa berbasis integrasi elektronik melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Atas pendampingan tersebut, para pemilik penangkaran menyambut baik dan cukup kooperatif. Para pemilik penangkaran cukup memahami alur dan syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pendaftaran penangkaran melalui OSS. Setelah sosialisasi OSS, petugas melakukan pengecekan pada kandang penangkaran. Hal-hal yang diamati adalah kandang, keturunan/ perkembangbiakan, sarana prasarana (wadah tempat minum, wadah makan, kandang isolasi, pemberian pakan dan Kesehatan satwa rusa). Sesuai hasil evaluasi, hampir semua izin penangkaran satwa akan segera berakhir. Perlu dilakukan pendampingan pengurusan dokumen izin penangkaran satwa dan pendampingan dalam pengurusan izin melalui OSS.



Evaluasi Penangkaran Milik Mohamad Dasuki

Penangkaran rusa timor pemilik Hj. Ardani Laduma dan Drs. Leonard Haning MM secara umum kondisi rusa dalam keadaan sehat namun belum ada tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan kesehatan teratur dan pemberian perawatan medis ketika diperlukan. Fasilitas kandang sudah baik telah dipagari dengan tembok beton. Manajemen pakan dan gizi rusa telah berjalan dengan baik, rusa diberikan pakan yang seimbang dan mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Kedua penangkaran ini belum ada Surat Izin Penangkaran dan belum ada hasil reintroduksi rusa ke habitat alam untuk memperkaya populasi rusa di area reintroduksi.

Kegiatan evaluasi penangkaran di BKW II dilaksanakan di beberapa tempat yaitu pemilik atas nama Abraham Ruga dan Maximus Ali Perajaka (Kabupaten Nagekeo), Yoseph Bhia Sekke Wea (Kabupaten Ngada), Eduardus Edymus Lamanepa, Yohanes Junior, Adam Geroda, Yoseph Gewajo Tobil, Suaifin Bunga, Roberto Fabiano Kraeng (Kabupaten Lembata).

Penangkaran rusa timor milik Abraham Ruga dan Maximus Ali Perajaka di Kabupaten Nagekeo telah memiliki kelengkapan administrasi penangkaran sebagai dasar untuk proses perizinan penangkaran, namun masih ada beberapa dokumen yang diperbaiki. Secara umum rusa timor dalam kondisi sehat, serta manajemen pakan dan gizi telah berjalan dengan baik. Rusa timor diberikan pakan yang seimbang dan mengandung nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhannya. Rekomendasi kedepannya perlu melakukan pemantauan kesehatan rusa timor secara intensif dan meningkatkan standar pemeliharaan kesehatan. Sedangkan penangkaran milik Yoseph Bhia Sekke yang ada di Kabu[at]en Ngada menunjukkan bahwa rusa timor telah mati pada tahun 2020 karena kondisi cuaca yang sangat dingin di lokasi penangkaran, sehingga kedepannya agar penangkaran ini dapat dikeluarkan dari data base BBKSDA NTT. Sedangkan seluruh penangkar di Kabupaten Lembata belum memiliki izin penangkaran, mereka telah bersedia untuk mengurus perizinan berusaha penangkaran TSL sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tabel 47. Analisis efisiensi pencapaian IKK 13 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Rasio	Keterangan
Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	98,00	100	1,02	efisien

Rasio efisiensi penggunaan sumber daya IKK ini di tahun 2023 dengan membandingkan antara capaian output dengan capaian input diperoleh rasio sebesar 1,02 sehingga dapat diindikasikan penggunaan sumberdaya sudah efisien dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023.

Dengan tercapainya IKK ini, maka diperoleh hasil berupa meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati spesies dan genetik tumbuhan satwa liar, sehingga memberikan dampak untuk melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.



**Sasaran Kegiatan :**  
*Terjaminnya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari*

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
*Jumlah penyelamatan satwa liar*

Sasaran kegiatan “Terjaminnya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari” diukur dengan beberapa indikator, salah satunya berupa Jumlah penyelamatan satwa liar. Capaian IKK ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 48. Perbandingan target dan realisasi sasaran IKK 14

Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK	Output		Anggaran		
		Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Jumlah penyelamatan satwa liar	15 Kejadian	17 Kejadian	113,33	532.000.000	530.647.016	99.75

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target 17 Kejadian Jumlah penyelamatan satwa liar dibutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. 532.000.000,- Realisasi output diperoleh 17 Kejadian (113,33 %) dan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 530.647.016,- (99.75%).

Tabel 49. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 14

TARGET IKK	REALISASI KEGIATAN		Prosentase (%)
15 Kejadian	17 Kejadian	Sosialisasi/Respon Konflik Satwa (Buaya Muara, Komodo, Penyu, Burung, Ular, Paus)	113,33
		Penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar (Buaya Muara, Komodo, Penyu, Burung, Ular, Paus) di wilayah kerja BBKSDA NTT	
		Penanganan Barang Bukti Temuan, penyerahan dan Pelepasliaran Satwa Liar	

Konflik antara manusia dengan buaya yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah kerja lingkup Balai Besar KSDA NTT menimbulkan persepsi yang kurang baik terhadap eksistensi buaya. Masyarakat menganggap buaya sebagai salah satu ancaman karena banyaknya korban manusia sehingga cenderung membalasnya dengan cara membunuh buaya tersebut. Upaya membalas dendam dengan cara tersebut tentunya akan merugikan upaya konservasi buaya sebagai salah satu satwa yang memiliki status perlindungan.

Dengan adanya penanganan konflik buaya ini diharapkan tidak ada lagi korban manusia (zero victim) atau seandainya masih saja terjadi konflik maka setidaknya ada upaya untuk meminimalisir terjadinya korban yang lebih banyak. Persepsi masyarakat terhadap upaya konservasi buaya akan menjadi lebih baik dengan tidak memusuhi buaya sehingga upaya konservasi dapat berjalan seiring dengan upaya menghindari konflik antara manusia dengan buaya.



Gambar 7. Grafik Jumlah Konflik Manusia dengan Buaya Tahun 2019-2023 di NTT

Selain melakukan kajian secara komprehensif terhadap seluruh aspek yang mendasari peristiwa konflik, juga perlu didukung dengan upaya koordinasi dengan berbagai unsur di tingkat pemerintah dan masyarakat, serta menggiatkan edukasi kepada seluruh masyarakat dengan mendayagunakan berbagai media.

Adapun kegiatan pelepasliaran satwa yang dilindungi ini dilakukan bukan hanya untuk mengembalikan satwa liar ke habitat alaminya, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menggalang perhatian dan dukungan parapihak baik pemerintah, masyarakat serta generasi muda dalam rangka perlindungan dan pelestarian satwa liar kebanggaan bangsa



Pelepasliaran Biawak Timor (*Varanus timorensis*) di Suaka Margasatwa Kateri



Pelepasliaran Komodo (*Varanus komodoensis*) di CA Wae Wuul

Tabel 50. Analisis efisiensi pencapaian IKK 14 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Rasio	Keterangan
Jumlah penyelamatan satwa liar	113,33	99.75	1,13	efisien

Rasio efisiensi penggunaan sumber daya IKK ini di tahun 2023 dengan membandingkan antara capaian output dengan capaian input diperoleh rasio sebesar 1,13 sehingga dapat diindikasikan penggunaan sumberdaya efisien dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023.

Dengan tercapainya IKK ini, maka diperoleh hasil berupa meningkatnya perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari, sehingga memberikan dampak untuk melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragamahayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.



**Sasaran Kegiatan :**  
*Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan Kawasan*

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
*Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education*

Sasaran kegiatan “Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan Kawasan” diukur dengan beberapa indikator, salah satunya berupa Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education. Capaian IKK ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 51. Perbandingan target dan realisasi sasaran IKK 15

Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK	Output		Anggaran		
		Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	1 Destinasi	1 Destinasi	100	500.000.000	499.617.110	99.92

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target 1 Destinasi dibutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- Realisasi output diperoleh 1 Destinasi (100 %) dan direalisasikan anggaran sebesar Rp. 499.617.110,- (99.92%).

Tabel 52. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 15

TARGET IKK		REALISASI KEGIATAN	Prosentase (%)
1 Destinasi	1 Destinasi	Persiapan Pelaksanaan Tim Terpadu Untuk Perubahan Fungsi CA Mutis Timau	100
		Ekspose Permohonan dan Penyusunan Rencana Kerja Tim Terpadu	
		Kajian Penelitian Lapangan Tim Terpadu ke Daerah Untuk Usulan	
		Finalisasi Laporan Akhir Tim Terpadu Usulan Perubahan Fungsi CA Mutis Timau	
		Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam berbasis SAVE	
		Persiapan Materi Promosi (Buletin)	
		Pameran Wisata Alam Tingkat Nasional	
		Penyusunan Branding Destinasi dalam rangka promosi wisata alam di Kawasan TWA 17 Pulau	

Nilai capaian kinerja pada IKK ini adalah 100% yang diperoleh melalui dukungan kegiatan usulan perubahan CA Mutis Timau dan penyusunan branding wisata alam TWAL Tujuh Belas Pulau, serta bimbingan teknis ekowisata pada 5 (lima) taman wisata alam yaitu TWA Ruteng, TWAL Tujuh Belas Pulau, TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere, TWA Menipo, dan TWA Camplong. Kegiatan lain yang juga mendukung pengelolaan wisata alam agar lebih optimal yakni pembuatan bulletin Rusa Timorensis. Adapun Destinasi Wisata Alam berbasis SAVE dikhususkan pada TWAL Tujuh Belas Pulau.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi peningkatan penerimaan negara bukan pajak dimana pada tahun 2022 sebesar Rp 182.440.970 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 284,255,700 dengan kata lain meningkat sebesar 56%.

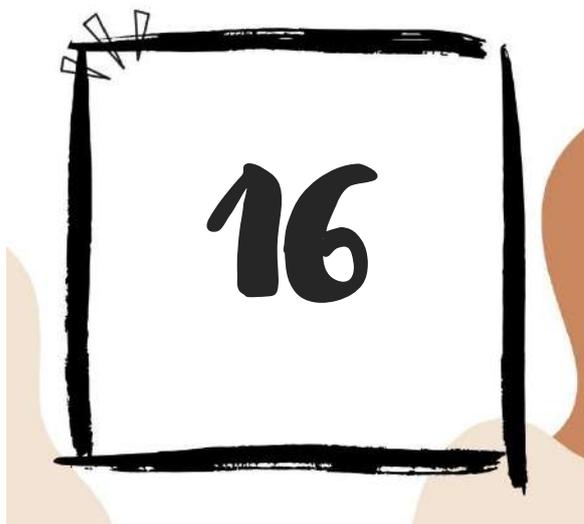
Tabel 53. Analisis efisiensi pencapaian IKK Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Rasio	Keterangan
Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	100	99.92	1,00	efisien

Rasio efisiensi penggunaan sumber daya IKK ini di tahun 2023 dengan membandingkan antara capaian output dengan capaian input diperoleh rasio sebesar 1,00 sehingga dapat diindikasikan penggunaan sumberdaya efisien dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023.

Dengan tercapainya IKK ini, maka diperoleh hasil berupa meningkatnya Jumlah Destinasi Wisata Alam *Science, Academic, Voluntary, Education*, sehingga memberikan dampak untuk peningkatan efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan Kawasan.





**Sasaran Kegiatan :**  
Meningkatnya  
pemulihan ekosistem

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
Luas ekosistem yang  
dipulihkan

Sasaran kegiatan “meningkatkan pemulihan ekosistem di kawasan konservasi” diukur dengan indikator berupa luas ekosistem yang dipulihkan. Capaian IKK ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 54. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 16

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Ikk	Output		Anggaran		
		Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Luas ekosistem yang dipulihkan	266,17 Hektar	100 Hektar	37,57	24.000.000	23.557.880	98.16

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target 266,17 hektar luas ekosistem yang dipulihkan dibutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. 24.000.000,-. Realisasi output diperoleh 100 hektar (150,00%) dan direalisasikan anggaran sebesar 23.557.880,- (98,16%).

Tabel 55. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 16

TARGET IKK	REALISASI KEGIATAN		Prosentase (%)
266,17 Hektar	100 Hektar	Perjalananan koordinasi/konsultasi/ mengikuti rapat/kegiatan pemulihan ekosistem	37,57

Penanaman dilaksanakan pada tahun 2022 di Suaka Margasatwa Kateri seluas 100 hektar. Pada tahun 2023 dilakukan pemeliharaan tahun pertama (P1). Untuk itu kegiatan yang dapat teralokasikan hanya perjalanan koordinasi/ konsultasi/ mengikuti rapat/ kegiatan pemulihan ekosistem di luar provinsi yang dilaksanakan pada Bulan Desember 2023. Rendahnya capaian kinerja tersebut disebabkan *refocusing* anggaran yang menyisakan kegiatan berupa rapat koordinasi/konsultasi dalam rangka pemulihan ekosistem. Dalam pelaksanaan pemulihan ekosistem pada SM Kateri, Balai Besar KSDA NTT berkolaborasi dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Benain Noelmina untuk penyediaan bibit serta monitoring hasil tanaman.

Tabel 56. Analisis efisiensi pencapaian IKK 16 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Rasio	Keterangan
Luas ekosistem yang dipulihkan	98,16	37,57	0,38	efisien

Rasio efisiensi penggunaan sumber daya IKK ini di tahun 2023 dengan membandingkan antara capaian output dengan capaian input diperoleh rasio sebesar 0,38 sehingga dapat diindikasikan penggunaan sumberdaya belum efisien dalam mendukung pencapaian kinerja Tahun 2023.



Pemeliharaan Tanaman (P1) di Suaka Margasatwa Kateri

Dengan tercapainya IKK ini, maka diperoleh hasil berupa luas ekosistem yang dipulihkan seluas 100 hektar, sehingga memberikan dampak untuk melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, Output yang diperoleh dari IKK ini adalah terpulihkannya ekosistem yang rusak di Suaka Margasatwa Kateri.

Outcome yang didapatkan dari beberapa kegiatan diatas adalah adanya alternatif pendapatan/mata pencaharian bagi masyarakat di sekitar kawasan kawasan melalui kegiatan pemulihan ekosistem, baik sebagai penyedia bibit, pupuk, ataupun terlibat langsung sebagai tenaga kerja. Kegiatan ini juga memberikan akses pengelolaan zona rehabilitasi di kawasan Suaaka Margasatwa Kateri. Masyarakat dapat mengelola lahan di zona rehabilitasi melalui penanaman tanaman pokok dan tumpangsari yang bisa mereka panen dan mendapatkan tambahan penghasilan dari kegiatan tersebut.



**Sasaran Kegiatan :**

Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi

**Indikator Kinerja Kegiatan :**

Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman Hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi

Sasaran kegiatan “meningkatkan kawasan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi” diukur dengan beberapa indikator salah satunya berupa luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman Hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi. Capaian IKK ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 57. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 17

Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK	Output		Anggaran		
		Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman Hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	276,64 Hektar	211 Hektar	76,27	346.310.000	304.839.090	94,22

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target 276,64 hektar luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi dibutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. 346.310.000,-. Realisasi output diperoleh 211 hektar (76,27%) dan direalisasikan anggaran sebesar Rp 304.839.090,- (94,22%).

Tabel 58. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 17

TARGET IKK		REALISASI KEGIATAN	Prosentase (%)
276,64 Hektar	211 Hektar	Inventarisasi dan Survei Potensi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Terestrial di Pulau Sumba, Flores, dan Sabu	76,27
		Verifikasi Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati	
		Ekspedisi kawasan Mutis dan sekitarnya bersama Perguruan tinggi/pecinta alam (4 Kelompok)	

Komponen untuk mendukung output ini adalah Inventarisasi dan Survei Potensi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Terestrial di Pulau Sumba, Flores, dan Sabu; Verifikasi Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati; dan Ekspedisi kawasan mutis dan sekitarnya bersama Perguruan tinggi/pecinta alam (4 Kelompok).

Kajian inventarisasi dan survei potensi di Pulau Sumba dilakukan pada 18 wilayah kelompok hutan seluas 162 768,04 ha. Dari seluruh areal studi yang paling luas adalah pada wilayah Praengpaha Mandas seluas 70 550,15 ha dan yang paling sempit adalah Hutan Bakau B seluas 23,36 ha.



Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati Tinggi di Pulau Sumba

Sebagian besar tutupan lahan pada areal kajian adalah vegetasi sekunder berupa padang sabana/padang rumput (101.095,38 ha), hutan lahan kering sekunder (35.080,88 ha) dan semak belukar (5.011,34 ha). Areal vegetasi primer berupa hutan lahan kering primer (18.976,77 ha), semak belukar (5.011,34 ha) dan hutan mangrove sekunder (889,80 ha). Selebihnya adalah vegetasi campuran/ gangguan/ buatan.

Jenis-jenis fauna yang ada di Pulau Sumba sangat beragam, terutama jenis avifauna baik endemik Sumba ataupun yang umum dijumpai disana. Pulau Sumba tergolong memiliki jenis dan anak jenis yang cukup tinggi. Data jenis burung selain didapatkan dari pengamatan langsung di lapangan, juga berasal dari berbagai sumber seperti Burungnesia dan GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Di Pulau Sumba terdapat 261 spesies yang tergolong ke dalam 64 famili. Berdasarkan hasil analisis pembobotan diperoleh luas kawasan total areal kajian adalah 168.699,93 Ha dengan potensi keanekaragaman hayati rendah seluas 118.418,72 Ha. Luas kawasan dengan potensi keanekaragaman hayati sedang seluas 28.015,15 Ha. Sedangkan luas kawasan dengan potensi keanekaragaman hayati tinggi seluas 22.266,06 Ha.



Elang bondol (*Haliastur indus*) di Pulau Sumba

Kajian inventarisasi dan survei potensi lainnya dilaksanakan di Pulau Sabu. Hasil klasifikasi tutupan lahan menunjukkan terdapat kawasan Hutan lahan kering primer, Hutan lahan kering sekunder, Perkebunan/kebun, Tegalan/ladang, Tanah kosong atau rerumputan, Pemukiman dan Semak belukar. Data penutupan lahan menggambarkan kondisi apakah vegetasi pada suatu wilayah masih asli atau sudah terganggu. Tutupan lahan pada area kajian selanjutnya digeneralisasi menjadi tiga kategori yaitu vegetasi primer, vegetasi sekunder dan vegetasi terganggu atau campuran. Hasil klasifikasi penutupan area kajian didominasi oleh vegetasi terganggu atau campuran dengan luasan 31.426,15 Ha atau sekitar 75% dari luas areal kajian.



Inventarisasi Potensi Keanekaragaman Hayati Tinggi di Pulau Sabu

Kondisi topografi Pulau Sabu dan rendahnya jenis tumbuhan yang tersebar di wilayah ini serta sangat kurangnya data maupun hasil penelitian terdahulu mengenai perjumpaan satwa liar, tercatat dari seluruh jenis yang pernah dilakukan perjumpaan langsung dan tidak langsung diketahui 5 jenis satwa dilindungi yaitu 3 jenis reptil dilindungi dan 2 jenis burung dilindungi. Pulau Sabu yang memiliki topografi dataran rendah dan musim kemarau yang berlangsung berkisar 6-8 bulan berpengaruh terhadap jumlah dan jenis keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Potensi keanekaragaman hayati di Pulau Sabu cukup tinggi dan beragam. Hasil pengamatan di lapangan terdapat beberapa satwa liar prioritas yang dilindungi baik oleh peraturan di Indonesia melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi maupun Peraturan Internasional yaitu IUCN. Satwa tersebut diantaranya yaitu: penyu, gajahan pengala (*Numenius phaeopus*), burung cerek (*Charadrius* sp).



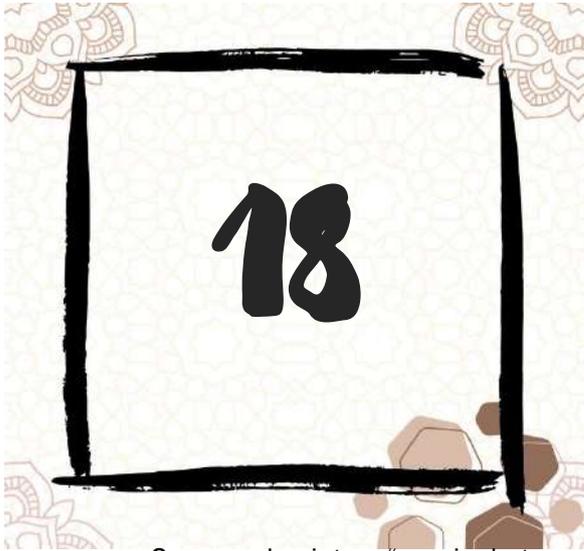
Trinil Pantai (*Actitis hypoleucos*) di Pulau Sabu

Penilaian potensi keanekaragaman hayati dinilai menggunakan analisis pembobotan dengan peta penutupan lahan, peta ketersediaan air dan peta sebaran tumbuhan dan satwa liar. Hasil analisis pembobotan diperoleh luas kawasan dengan potensi keanekaragaman hayati rendah seluas 40.607,2 Ha (96,27 %) luas kawasan dengan potensi keanekaragaman hayati sedang seluas 1.257.45 Ha (2,98 %); dan luas kawasan dengan potensi keanekaragaman hayati tinggi seluas 315,97 ha (0,75 %)

Tabel 59. Analisis efisiensi pencapaian IKK 17 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Rasio	Keterangan
Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman Hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	94,22	76,27	0,81	tidak efisien

Rasio efisiensi penggunaan sumber daya IKK ini di tahun 2023 dengan membandingkan antara capaian output dengan capaian input diperoleh rasio sebesar 0,81 sehingga dapat diindikasikan penggunaan sumberdaya belum efisien dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023. Dengan tercapainya IKK ini, maka diperoleh hasil berupa peningkatan jumlah kawasan yang dilakukan inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman Hayati tinggi di luar kawasan konservasi, sehingga memberikan dampak kawasan hutan dapat lestari dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.



**Sasaran Kegiatan :**  
*Meningkatnya Efektivitas  
 Pengelolaan Kawasan  
 Ekosistem Esensial*

**Indikator Kinerja Kegiatan :**  
*Jumlah Kawasan Ekosistem  
 Esensial yang ditingkatkan  
 Efektivitas Pengelolaannya*

Sasaran kegiatan “meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan ekosistem esensial” diukur dengan indikator berupa jumlah kawasan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya. Capaian IKK ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 60. Perbandingan target dan realisasi sasaran kegiatan IKK 18

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Ikk	Output		Anggaran		
		Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	1 unit KEE	1 unit KEE	100,00	26.100.000	26.099.200	100,00

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai target 1 unit KEE (100,00%) dibutuhkan dukungan anggaran sebesar Rp. 26.100.000,- dan direalisasikan sebesar 26.099.200,- (100,00%).

Tabel 61. Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK 18

TARGET IKK		REALISASI KEGIATAN	Prosentase (%)
1 unit KEE	1 unit KEE	Repatriasi Kura-Kura Rote ke Habitatnya ( <i>Chelodina mccordi</i> )	100.00



Komponen untuk mendukung output ini adalah yakni terselenggaranya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan ekosistem esensial Rote melalui dukungan kegiatan Repatriasi Kura-kura Rote. Pada tanggal 8 Agustus 2023, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) cq. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik (KKHSG), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan repatriasi kura-kura Rote tahap II.

Masih dalam rangkaian Repatriasi Kura-kura Rote dan peringatan Hari Konservasi Alam Nasional, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, Balai Besar KSDA NTT bersama IPEHINDO bekerjasama dengan Universitas Nusa Cendana dan WCS-IP menyelenggarakan Seminar dan Workshop Kura-kura Rote. Agenda ini menghadirkan narasumber dari Direktorat KKHSG-Direktorat Jenderal KSDAE, BRIN, IPB University, Universitas Nusa Cendana, Mandai Nature, Bronx Zoo, Mandai Wildlife Group, serta pejabat fungsional dari Balai Besar KSDA NTT. Peserta yang hadir dari mahasiswa Universitas Nusa Cendana, para pimpinan dan pejabat fungsional khususnya PEH lingkup UPT KLHK.

Seminar dan workshop ini merupakan ekspos hasil kajian yang dilakukan dalam rangka konservasi Kura-kura Rote dan pembelajaran mengenai konservasi satwa liar. Kegiatan lain yang mendukung peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan ekosistem esensial Rote serta upaya konservasi kura-kura Rote yaitu penyiapan masyarakat, penguatan kelembagaan adat, penguatan ekonomi masyarakat sekitar habitat kura-kura Rote, kajian ilmiah meliputi biofisik dan sosial ekonomi, pemenuhan sarana prasarana instalasi karantina hewan, serta penetasan telur kura-kura rote di dalam instalasi karantina hewan.



Tabel 62. Analisis efisiensi pencapaian IKK 18 Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Input (%)	Capaian Output (%)	Rasio	Keterangan
Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	100,00	100,00	1,00	efisien

Rasio efisiensi penggunaan sumber daya IKK ini di tahun 2023 dengan membandingkan antara capaian output dengan capaian input diperoleh rasio sebesar 1,00 sehingga dapat diindikasikan penggunaan sumberdaya sudah efisien dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2023, sumber daya (SDM/Anggaran) yang digunakan sudah sepenuhnya mendukung capaian kinerja tahun 2022

Dengan tercapainya IKK ini, maka diperoleh hasil berupa peningkatan efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan upaya konservasi keanekaragaman hayati, sehingga memberikan dampak untuk melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran BBKSDA NTT digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan di bidang KSDAE yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal KSDAE yaitu : Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA- 029.05.2.239881/2023 tanggal 30 November 2022, jumlah alokasi anggaran BBKSDA NTT sebesar Rp 28.904.772.000,- selanjutnya mengalami revisi anggaran sebanyak 16 (enam belas) kali.

Berikut tabel perubahan komposisi anggaran BBKSDA NTT Tahun 2023 berdasarkan jenis belanja.

Tabel 63. DIPA BBKSDA NTT Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
51 Belanja Pegawai	14.657.431.000	14.404.183.980	98,27 %
52 Belanja Barang	13.047.341.000	12.823.371.598	98,28 %
53 Belanja Modal	1.200.000.000	1.199.375.068	99,95 %
<b>Jumlah</b>	<b>28.904.772.000</b>	<b>28.426.930.646</b>	<b>98,35 %</b>

Meskipun revisi anggaran selama tahun 2023 pada BBKSDA NTT cukup banyak tetapi tidak berdampak signifikan dalam pada pencapaian target-target kinerja dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini dapat terlihat pada angka serapan anggaran dan capaian kinerja. Dari kondisi ini memberikan dampak yang positif dalam mendukung pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan berdasarkan jenis belanja struktur anggaran BBKSDA NTT Tahun 2023 terbagi tiga yaitu belanja barang, belanja modal dan belanja pegawai. Realisasi anggaran BBKSDA NTT Tahun 2023 sebesar 98,35 %.

### 3.3. Penghargaan Atas Prestasi Kerja



Gambar 8. Piagam penghargaan dari Pos Kupang Award – Penghargaan Kepedulian dan Penyelamatan Satwa Liar Endemik Nusa Tenggara Timur pada Pos Kupang Award 2023



Gambar 9. Ucapan Terima Kasih dari Dinas Pariwisata Kota Kupang kepada Balai Besar KSDA NTT sebagai Dukungan Pelaksanaan Koepan Festival 2023

## BAB. 4 PENUTUP

Capaian kinerja Balai Besar KSDA NTT tahun 2023 sebesar 102,16 %, capaian efektivitas sebesar 0,92 dan capaian efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,04 menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan konservasi BBKSDA NTT di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan konservasi BBKSDA NTT telah terjamin efektifitasnya. Dari 18 IKK dan *output* yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Balai Besar KSDA NTT dapat memenuhi keseluruhan target yang telah ditetapkan.

Peningkatan kinerja BBKSDA NTT akan terus dilakukan pada masa mendatang, dengan fokus pada beberapa perbaikan diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pemulihan ekosistem di zona rehabilitasi kawasan konservasi yang dikelola BBKSDA NTT melalui kemitraan konservasi memerlukan monitoring, pendampingan dan dukungan dari seluruh pihak agar keberhasilan kegiatan pemulihan ekosistem terjamin.
- 2) Kegiatan kerjasama yang telah terjalin dengan berbagai pihak dalam menunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem di BBKSDA NTT (pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekowisata, pendidikan dan riset konservasi SDAHE, pemulihan ekosistem dan penguatan fungsi/pembangunan strategis) perlu dioptimalkan dan ditingkatkan penerapannya pelaksanaannya sampai selesainya kegiatan kerjasama tersebut.
- 3) Peningkatan ekonomi produktif di seluruh desa penyangga kawasan konservasi BBKSDA NTT melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat serta diversifikasi produk pemberdayaan masyarakat dengan tahapan petik olah jual, dengan harapan masyarakat mampu beralih profesi, komoditi, dan lokasi, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap kawasan konservasi BBKSDA NTT.
- 4) Memperbaiki, membangun, dan meningkatkan fasilitas wisata yang ada di BBKSDA NTT, dan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan memperbaiki akses dan fasilitas wisata yang menuju ke kawasan wisata dan meningkatkan promosi dan publikasi wisata di BBKSDA NTT.

# LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Arief Mahmud, M.Si.  
Jabatan : Kepala Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur

Berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2023  
Kepala Balai Besar,  
  
Ir. Arief Mahmud, M.Si.  
NIP. 19671130 199403 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
BALAI BESAR KSDA NUSA TENGGARA TIMUR**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Arief Mahmud, M.Si.  
Jabatan : Kepala Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut, M.Agr.Sc.  
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut, M.Agr.Sc.  
NIP. 19710809 199512 1 001



Jakarta, Desember 2023  
Kepala Balai Besar,

Ir. Arief Mahmud, M.Si.  
NIP. 19671130 199403 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SATUAN KERJA**

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
 Unit Satuan Kerja : Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur  
 Tahun Anggaran : 2023

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET IKK
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Ditjen KSDAE Level Maturitas SPIP Ditjen KSDAE Laporan Keuangan Ditjen KSDAE yang tertib dan akuntabel	79,5 Poin 3 Level 1 Dokumen
2	Perencanaan Kawasan Konservasi	Meningkatnya pemantapan (prakondisi) status dan fungsi kawasan konservasi untuk peningkatan nilai efektivitas	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif	69.000 Hektar
			Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	4 Unit KK
			Jumlah kerjasama penguatan fungsi dan pembangunan strategis pada kawasan konservasi	1 Dokumen
3	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Terjaminnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi	Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat	25 Desa
			Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi	1.000 Hektar
			Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam	5 Orang
			Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya	Kelompok

		Terjaminnya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya	14 Unit KK
			Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi	116 Hektar
			Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan penanganan dan pengendalian kebakaran	30 Unit
4	Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik	Terjaminnya inventarisasi dan verifikasi ruang perlindungan keanekaragaman hayati didalam dan diluar kawasan konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	139.444 Hektar
			Jumlah Pusat Konservasi yang dibangun	Unit
			Jumlah mekanisme balai kliring keanekaragaman hayati	Mekanisme
		Terjaminnya pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar yang lestari dan berkelanjutan	Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	3 Entitas
		Terjaminnya perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik tumbuhan dan satwa liar secara lestari	Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	5 Entitas
			Jumlah penyelamatan satwa liar	15 Kejadian
		Terjaminnya pendanaan konservasi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan	Jumlah sistem pendanaan konservasi keanekaragaman hayati	Sistem
5	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi serta kolaborasi pengelolaan Kawasan	Jumlah destinasi wisata alam prioritas	Destinasi
			Jumlah Entitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan panas bumi dan karbon	Entitas
			Jumlah perizinan pemanfaatan jasa lingkungan air	Entitas
			Jumlah Destinasi Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education	1 Destinasi
			Jumlah destinasi wisata alam bahari	Destinasi

6	Pemulihan Ekosistem	Meningkatnya pemulihan ekosistem	Luas ekosistem yang dipulihkan	266,17 Hektar
7	Pembinaan pengelolaan Ekosistem Esensial	Meningkatnya kawasan yang dilakukan inventarisasi dan Verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Hektar
		Meningkatnya efektifitas pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	1 Unit KEE

Program/Kegiatan :

Anggaran :

**Program Dukungan Manajemen**

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

Rp. 21.543.772.000,-

**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**

1. Perencanaan Kawasan Konservasi  
 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi  
 3. Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik  
 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi  
 5. Pemulihan Ekosistem

Rp. 1.150.000.000,-  
 Rp. 4.018.620.000,-  
 Rp. 1.230.970.000,-  
 Rp. 500.000.000,-  
 Rp. 24.000.000,-

**Program Kualitas Lingkungan Hidup**

1. Pembinaan Pengelolaan Ekosistem Esensial

Rp. 372.410.000,-

**Total Anggaran :**

**Rp. 28.839.772.000,-**

Direktur Jenderal,  
  
 Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut, M.Agr.Sc.  
 NIP. 197108091995121001

Jakarta, Desember 2023  
 Kepala Balai Besar,  
  
 Ir. Anief Mahmud, M.Si.  
 NIP. 196711301994031004

*Senja di TWA Menipo*

